

SEBUAH KAJIAN
MENGENAI
BINA
LINGKUNGAN



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SEBUAH KAJIAN
MENGENAI
BINA
LINGKUNGAN

Ardansyah, S.E., M.M



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SEBUAH KAJIAN MENGENAI BINA LINGKUNGAN

Penulis

Ardansyah, SE.,MM.

Desain Cover & Layout

AURA

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x + 147 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2021

ISBN:

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Sejak kemerdekaan republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 akses pendidikan dirasakan masih belum terbuka secara luas terutama terhadap masyarakat kurang mampu, meskipun ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahkan Bidikmisi untuk perguruan tinggi. Sebab sekolah negeri didominasi siswa ekonomi atas, selain itu pembangunan unit sekolah belum berdasarkan data. Banyak daya tampung sekolah daerah di atas jumlah siswa. Salah satu solusi program yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut adalah Program Siswa Bina Lingkungan.

Buku ini mencoba mengkaji apakah pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas guna mengentaskan angka anak-anak putus sekolah sudah berjalan efektif.

Akhirnya penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak dengan terbitnya buku ini. Tak ada gading yang tak retak, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih sempurnanya buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan	1
A Latar belakang kajian.....	1
B Fokus dan Subfokus kajian	21
C Perumusan Masalah Kajian	22
D Tujuan dan Kegunaan Kajian	22
Bab 2 Kajian Teoretik.....	24
A Konsep Kebijakan Publik.....	24
B Program Bina Lingkungan.....	25
C Evaluasi Program.....	32
D Kriteria Evaluasi.....	51
E Konsep Program/Kebijakan Bina Lingkungan	61
F Hasil Penelitian yang Relevan.....	63
G Kerangka Pikir.....	66
Bab 3 Metode Pembahasan.....	68
A Pendekatan Pembahasan.....	68
B Data dan Sumber Data	71
C Instrumen Kajian	76
D Metode Pengumpulan Data	81
E Teknik Analisa Data	83

Bab 4 Paparan Data dan Pembahasan.....	95
A Paparan Data Umum	95
B Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian	108
C Pembahasan Hasil Kajian.....	133
Bab 5 Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi	137
A Kesimpulan	137
B Implikasi	140
C Rekomendasi	142
Daftar Pustaka	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Proyeksi Baseline Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan (%)	9
Tabel 1.2 Hasil Proyeksi Baseline Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat (%)	10
Tabel 1.3 Data Penduduk per kecamatan Terpadat di Kota Bandar Lampung.....	15
Tabel 1.4 Jumlah SMP Negeri pada Kecamatan yang Penduduknya Terpadat	15
Tabel 1.5 Jumlah SMP Negeri yang paling banyak per kecamatan.....	16
Tabel 1.6 Jumlah Anak Usia 10-14 tahun (Tingkat SMP) di 5 Kecamatan Terpadat Kota Bandar Lampung	16
Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan	64
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian.....	75
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan	78
Tabel 3.4 Pedoman Observasi	80
Tabel 3.5 Dokumen yang Dibutuhkan.....	81
Tabel 3.6 Penentuan Kode Informan Wawancara.....	86
Tabel 3.7 Kode Jenis Data Wawancara	86
Tabel 4.1 Keadaan Guru SMP se Kota Bandar Lampung	97
Tabel 4.2 Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 19 Bandar Lampung.....	100

Tabel 4.3	Data Jumlah Siswa 5 (lima) Tahun Terakhir SMPN 19.....	101
Tabel 4.4	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 21 Bandar Lampung.....	102
Tabel 4.5	Data Jumlah Siswa 5 (lima) Tahun Terakhir SMPN 21.....	102
Tabel 4.6	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 23.....	104
Tabel 4.7	Data Jumlah Siswa 5 (lima) Tahun Terakhir SMPN 23.....	105
Tabel 4.8	Data Tenaga Pendidik SMPN 28.....	106
Tabel 4.9	Data Tenaga Kependidikan.....	106
Tabel 4.10	Data Siswa Tahun Pelajaran 2005/2006 s.d 2019/ 2020.....	107
Tabel 4.11	Coding Informan.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.....	3
Gambar 1.2	Grafik IPM Provinsi Lampung	4
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan.....	67
Gambar 3.1	Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	81
Gambar 3.2	Triangulasi Teknik.....	91
Gambar 3.3	Triangulasi Sumber.....	92



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG KAJIAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tertuang pula dalam pasal 31 yang berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, dengan harapan bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang unggul dari segi kualitas sumber daya manusianya. Sebagai bentuk usaha atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kebijakan tentang pendidikan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Beberapa kebijakan pendidikan yang ada saat ini antara lain, wajib belajar 9 tahun dan saat ini sudah berkembang dengan adanya wajib belajar 12 tahun, serta kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya.

Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau

¹ Floriberta, 2014. Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya: Penerbit: BooKu: Yogyakarta. Cet. 1.

bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan akal, anugerah Allah untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah SWT. Sehingga dinyatakan dalam al-Qur'an Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke tingkat yang tinggi (lihat : Qs. Al- Mujadilah : 11) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ادْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



Juga dalam hadits Nabi disebutkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan : عَلَى فَرِيضَةٍ الْعِلْمِ طَلَبُ وَمُسْلِمَةٍ مُسْلِمٍ كُلِّ (HR. Ibnu Abdil Barr).

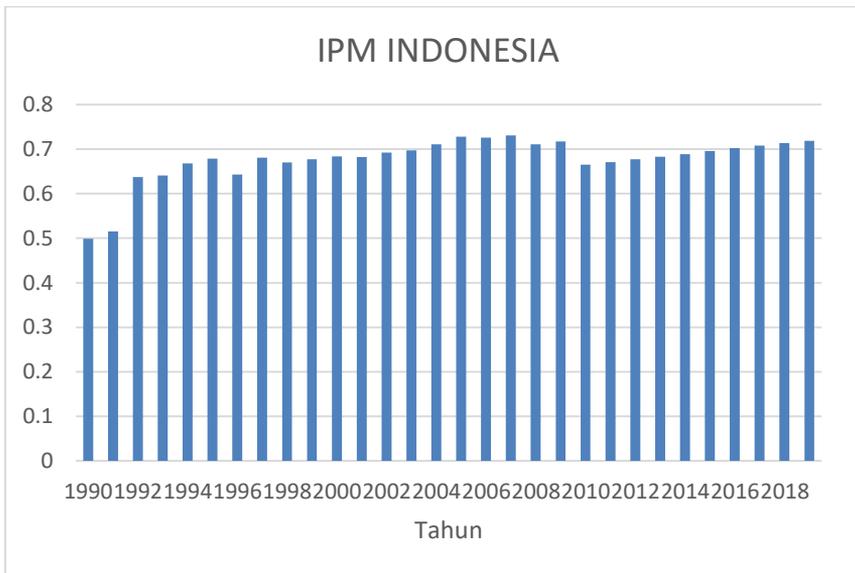
Kualitas atau mutu sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting, karena manusia merupakan insan penggerak pembangunan. Mutu pengembangan sumber daya manusia di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.² Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998) dan ke-109 (1999).

Sejak tahun 1990 sampai dengan 1995 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia umumnya mengalami peningkatan. Penurunan pernah terjadi yakni pada tahun 1996

² <http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-pendidikan-di-indonesia/>

dan 1998. Dan meningkat kembali mulai sejak tahun 1999 hingga 2005, kemudian pada tahun 2006 terjadi sedikit penurunan dan pada tahun 2007 IPM Indonesia meningkat kembali. Penurunan juga terjadi pada tahun 2008, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010.³ Sementara itu Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014.⁴

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia



Sumber: BPS, berbagai tahun

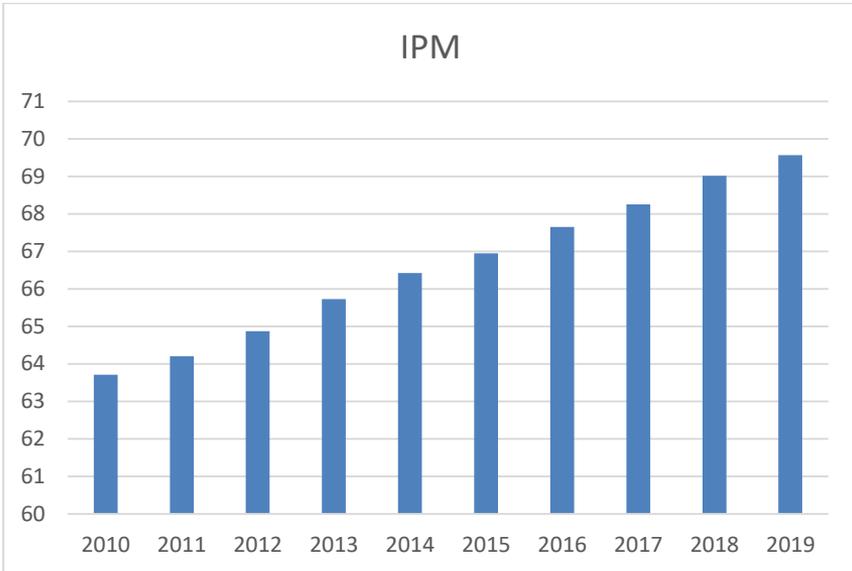
Kalau kita melihat perkembangan IPM di Indonesia dari tahun ke tahun, berdasarkan data dari tahun 1990 s.d sekarang terlihat relative datar, artinya tidak terjadi peningkatan yang

³ <http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/download/1373/1178>

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>.

signifikan, hal yang sama juga terjadi pada provinsi Lampung, seperti digambarkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Grafik IPM Provinsi Lampung



Sumber : BPS dari beberapa tahun.

Akses pendidikan dirasakan masih belum terbuka secara luas terutama terhadap masyarakat kurang mampu, menurut Charismiadji (2019)⁵ meskipun ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahkan Bidikmisi untuk perguruan tinggi, persentase peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) kurang dari satu persen empat tahun terakhir. Sebab sekolah negeri didominasi siswa ekonomi atas, selain itu pembangunan unit sekolah belum berdasarkan data. Banyak daya tampung sekolah daerah di atas jumlah siswa.

KIP tidak terbukti meningkatkan APM. Untuk SD kenaikan hanya 0,77 persen sejak 2014, sedang SMP 0,87 persen dan SMA sederajat sebesar 0,92 persen. Memang ada peningkatan jumlah siswa bersekolah, tetapi secara persentase hanya di bawah satu persen.

⁵ <http://www.koran-jakarta.com/benahi-mutu-pendidikan/>

Merdeka belajar merupakan program kebijakan baru kementreian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:⁶

1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi diharapkan waktu guru dalam pembuatan adminsitrai dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Untuk provinsi Lampung, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2015 menempati urutan terendah di Sumatera.⁷ Untuk kota Bandar Lampung, indeks pembangunan manusia

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar.

⁷ Radar Lampung, Kamis 15 Oktober 2015, h. 12.

(IPM) tahun 2017 menduduki posisi 65 yakni sebesar 75,98.⁸ Data APM provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir untuk tingkat SMP/MTs/Paket B tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, seperti dipublikasikan oleh BPS berikut: 2011 (67.06); 2012 (72.08); 2013 (74.96); 2014 (77.98); 2015 (78.20); 2016 (78.34); 2017 (79.24); 2018 (80.23); dan 2019 (80.40).

Sistem pendidikan Indonesia yang sebelumnya diatur secara umum dan bersifat sentralistik, namun sejak diterbitkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen penyelenggaraan pendidikan menjadi desentralisasi, khususnya pada pasal 13 menyatakan bahwa: penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial merupakan salah satu dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam skala provinsi. Pada pasal 14 dinyatakan pula bahwa: penyelenggaraan pendidikan juga merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota untuk yang berskala kabupaten/kota.⁹ Sejak era reformasi hingga tahun 2013, kebijakan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan negara diselenggarakan dengan manajemen yang desentralistik. Kebijakan yang bersifat desentralistik merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia untuk membangun sumber daya manusia di daerah yang unggul, pada tatanan kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik desentralisasi (Undang-Undang No. 32 tahun 2004) kemudian Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 tahun 2003, pasal 11 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kabupaten_dan_Kota_di_Indonesia_menurut_IPM

⁹ Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. Tentang: Pemerintahan Daerah: yang diunduh dari: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Pada ayat (2) menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”¹⁰ Dalam pandangan Islam, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam masalah pendidikan, sesuai sabda rasulullah bahwa pemimpin atau pemerintah adalah pengabdian atau pelayan masyarakat, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya dunia pendidikan diwilayahnya. Sabda rasulullah: *سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ*. (أبو نعيم وابن بابويه)

pemimpin suatu kaum adalah pengabdian dan pelayan mereka (HR. Abu Naim).¹¹ Juga sabda rasulullah:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوكٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوكٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوكٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوكَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوكٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوكٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

yang artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinan (rakyatnya), setiap perempuan/ibu adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya.”¹²

¹⁰ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional, yang diunduh dari: <http://sindiker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>

¹¹ Rivai, Veithzal dan Mulyadi, Deddy, 2013. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi; Edisi Ketiga; Rajawali Press; Jakarta. h. 11

¹² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 147 H./1987 M), Juz. II, h. 848. Abu Al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya” al-Turas al-Arabi, t.th.), Juz. III h. 1459.

Melalui peraturan bersama antara menteri pendidikan dan kebudayaan RI dan menteri agama RI, Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 tahun 2014, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah, pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas baik melalui jalur umum maupun agama. Pada pasal 2 disebutkan: Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Angka partisipasi sekolah remaja setingkat siswa menengah atas di Lampung masih rendah. Ada sebanyak 40 persen lebih remaja usia 16 - 18 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku setingkat SMA, ternyata tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, APS usia 16 - 18 tahun di Lampung pada 2012 tercatat sebanyak 59,8 persen. Artinya, sebanyak 40,2 persen remaja pada usia tersebut masih tergolong sebagai remaja yang tidak mengenyam pendidikan SMA dan atau mengalami putus sekolah. Ironisnya, angka partisipasi sekolah di Lampung terus mengalami penurunan sejak 2009 lalu. Penurunan persentase APS terbanyak terjadi dari kelompok usia 13 - 15 tahun (setara usia sekolah menengah pertama/SMP) ke kelompok usia 16 - 18 tahun (setara SMA).

Pada 2008, APS usia 16 - 18 tahun tercatat sebanyak 85,92 persen. Angka ini anjlok menjadi 50,44 persen pada 2009. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, tingkat partisipasi sekolah masyarakat juga merosot, yakni sebesar 35,28 persen (2010), 30,44 persen (2011), dan 30,23 persen (2012).¹³

¹³ Tribunlampung.co.id. senin, 10 Maret 2014, yang diunduh dari: <http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan-penyebab-40-persen-remaja-di-lampung-tak-bisa-bersekolah?page=3>

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa masih banyak anak putus sekolah di provinsi Lampung.

Di Bandar Lampung angka penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup besar yaitu 7 s.d 8 persen dari jumlah penduduk, seperti disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Hasil Proyeksi Baseline Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan (%).

Kabupaten/Kota	2015	2019	2020	2025	2030
Lampung Selatan	8.95	5.27	5.37	5.79	6.14
Lampung Tengah	1.25	1.75	1.73	1.61	1.50
Lampung Utara	6.47	4.19	4.19	4.18	4.18
Lampung Barat	3.78	2.89	2.90	2.92	2.94
Tulang Bawang	6.62	5.77	5.86	6.24	6.56
Tanggamus	3.96	4.71	4.76	4.98	5.16
Lampung Timur	3.11	3.13	3.16	3.32	3.44
Way Kanan	6.82	4.61	4.63	4.71	4.77
Pesawaran	3.56	3.45	3.51	3.74	3.93
Pringsewu	3.24	4.73	4.79	5.05	5.25
Mesuji	2.61	4.32	4.54	5.49	6.27
Tulang Bawang Barat	5.04	2.85	2.78	2.43	2.12
Bandar Lampung	8.09	7.42	7.46	7.66	7.83
Metro	5.05	6.51	6.54	6.69	6.81
Provinsi Lampung	5.17	4.90	4.93	5.04	5.13

Sumber: Buku SDGs Lampung, tahun 2018

Sedangkan data angka partisipasi sekolah dan putus sekolah untuk kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.2.¹⁴

¹⁴ Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2014, Diterbitkan oleh: BPS Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.2 Hasil Proyeksi Baseline Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat (%)

Kabupaten/Kota	2015	2019	2020	2025	2030
Lampung Selatan	96.01	94.32	95.60	101.96	108.32
Lampung Tengah	104.95	105.72	107.29	115.14	122.99
Lampung Utara	101.07	92.55	93.66	99.42	105.53
Lampung Barat	107.71	95.78	96.41	99.55	102.70
Tulang Bawang	91.83	93.82	94.70	99.10	103.49
Tanggamus	97.39	93.57	94.27	97.78	101.29
Lampung Timur	101.18	95.35	96.39	101.81	107.53
Way Kanan	97.01	95.10	96.56	103.86	111.15
Pesawaran	102.23	93.93	94.58	97.93	101.39
Pringsewu	103.53	101.76	102.87	107.68	111.62
Mesuji	94.98	102.01	103.95	112.40	119.31
Tulang Bawang Barat	85.06	104.59	107.01	117.51	126.10
Bandar Lampung	108.82	89.52	89.47	89.25	89.06
Metro	118.80	103.60	104.07	106.41	108.76
Provinsi Lampung	100.84	95.28	96.28	101.40	106.80

Sumber: Buku SDGs Lampung, tahun 2018

Jumlah penduduk yang berumur 15 th ke-atas yang hanya tamat SMP pada tahun 2019 ada sebanyak 81.728, dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 76.800 orang, yang menganggur sebanyak 4.928 orang.¹⁵ Pada Tabel 1.3 tersebut di atas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Angka anak putus sekolah pada tingkat SMP dari tahun 2009 s.d. 2013 secara rata-rata meningkat sebesar 5,25%, yakni pada tahun 2010 meningkat sebesar 3%, tahun 2011 turun sebesar 3%, pada tahun 2012 meningkat sebesar 13%, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 3%. Begitu juga pada pendidikan setingkat SMA, terdapat peningkatan anak putus sekolah dari tahun ke tahun secara rata-rata sebesar 1,25%, yakni pada tahun 2010 meningkat sebesar 7%, pada tahun

¹⁵ Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020.

2011 turun sebesar 8%, tetapi pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 2%, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 4%. Oleh karena itu maka dibutuhkan solusi melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah.

Salah satu solusi program yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut adalah Program Siswa Bina Lingkungan. Program ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas guna mengentaskan angka anak-anak putus sekolah.

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatasi jumlah angka anak putus sekolah. Kebijakan pendidikan tersebut telah diatur melalui Perda No. 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan dikeluarkan pula Peraturan Walikota No. 49 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.

Perda Kota Bandar Lampung No.1 tahun 2012 bagian kedua, pasal 35 menjelaskan tentang penerimaan dan daftar ulang peserta didik baru. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui dua jalur. Kedua jalur tersebut adalah jalur reguler, dan jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan adalah jalur khusus yang diperuntukkan bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah. Jalur bina lingkungan ini merupakan suatu bentuk program pendidikan dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Pada tahun 2019 pemda Kota Bandar Lampung kembali melaksanakan biling dengan sistem zonasi,¹⁶ dimana Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri di Bandar Lampung tahun ajaran 2019/2020 dipastikan mengacu pada Permendikbud No. 51 Tahun 2019. Artinya, PPDB didasarkan jarak tempat tinggal (domisili) terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Khusus di Bandarlampung peta zonasi PPDB akan berlaku 10 zona yang tersebar di 20 kecamatan. Penentuan masing-masing zona berdasarkan jarak domisili calon siswa dengan kedekatan sekolah. Atau berdasarkan wilayah domisili.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung, Ir. Daniel Marsudi mengatakan, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 3 cara. Yakni melalui sistem zonasi (90 persen); prestasi (5 persen); dan perpindahan tugas orang tua/wali (5 persen) berdasarkan daya tampung sekolah. “Sekolah wajib menerima siswa calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan kuota paling sedikit 90 persen itu,”. Adapun domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. “Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili,”.

Adapun jadwal PPDB 2019 SMP negeri untuk zonasi reguler pendaftaran dan proses seleksi real time dilakukan pada 26-28 Juni, pengumuman 29 Juni, pendaftaran ulang 1-2 Juli, dan masuk masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kelas VII 15-17 Juli.

Peta zonasi PPDB SMP negeri di Bandarlampung :

¹⁶ <https://radarlampung.co.id/2019/04/09/skema-zonasi-berlaku-ini-daftar-smp-di-kota-sesuai-domisili/>

- Zona 1 : SMPN 4, 9, 23, 25 meliputi wilayah Kecamatan Enggal, Tanjungkarang Pusat, Telukbetung Selatan.
- Zona 2 : SMPN 1, 5, 12, 33 meliputi wilayah Kecamatan Enggal, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Kedamaian, Wayhalim.
- Zona 3 : SMPN 7, 10, 32, 34 meliputi wilayah Kecamatan Langkapura, Kedaton, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat.
- Zona 4 : SMPN 2, 28, 22 meliputi wilayah Kecamatan Kemiling dan Rajabasa.
- Zona 5 : SMPN 13, 14, 26 meliputi wilayah Kecamatan Kemiling.
- Zona 6 : SMPN 8, 19, 20 meliputi wilayah Kecamatan Labuhan Ratu dan Tanjungsenang.
- Zona 7 : SMPN 16, 17, 18, 35 meliputi wilayah Kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Bumi Waras.
- Zona 8 : SMPN 3, 6, 15, 27 meliputi wilayah Kecamatan Telukbetung Barat dan Telukbetung Timur.
- Zona 9 : SMPN 11, 30, 37, 38, 39 meliputi wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi, Bumi Waras.
- Zona 10 : SMPN 21, 24, 29, 31, 36 meliputi wilayah Kecamatan Wayhalim, Sukarame, Sukabumi.

Jalur bina lingkungan merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif dari pemerintah Kota Bandar Lampung, diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat golongan ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama dengan masyarakat lainnya. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur bina lingkungan telah berjalan sejak tahun ajaran 2011/2012 sampai saat ini. Calon siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Khusus bagi siswa jalur bina lingkungan seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP.

Kebijakan PPDB melalui jalur bina lingkungan jika dilihat dari tujuannya sangat baik dan merupakan suatu bentuk inovasi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memajukan dunia pendidikan. Namun, seiring dengan berjalannya kebijakan PPDB jalur bina lingkungan masih ditemui berbagai kendala pada tahap implementasinya. Kendala tersebut diantaranya, seperti adanya ketidaksesuaian antara kuota PPDB dimana pada aturan Perda No. 1 tahun 2012 disebutkan kuota PPDB reguler 70% dan bina lingkungan 30%, lalu di lapangan terjadi berlaku kuota 50% reguler dan 50% bina lingkungan dengan dasar Perwali.¹⁷ Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan lebih dari 30%.¹⁸

Pada program biling Kota Bandar Lampung untuk tahun ajaran 2015/2016 menurut Upi Fitriyani, Asisten Ombudsman RI Lampung, masih terdapat ketidak sinkronan dari ketiga landasan hukum program biling tersebut, yaitu: Perda Nomor 1 tahun 2012, perwali No. 49 tahun 2013, serta juklak PPDB Nomor: 800/1070/IV.40/2015, jika landasan hukum biling sudah bermasalah sejak awal, pasti turunan programnya juga akan rancu.¹⁹ Terkait dengan keberhasilan suatu program, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Masih kurang tepatnya pembagian zonasi, dimana: data penduduk Kota Bandar Lampung jika dilihat per kecamatan berdasarkan tingkat kepadatannya, yang terpadat berada pada kecamatan Tanjungkarang Timur diikuti oleh kecamatan Bumi Waras dan kecamatan Tanjungkarang Pusat, dengan rata-rata sebanyak 14.628 penduduk per km² seperti dapat dilihat pada Tabel 1.3.

¹⁷ <http://lampost.co/berita/ombudsman-bina-lingkungan-langgar-tatanam-hukum>

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/9156/14/BAB%20I.pdf>

¹⁹ <http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k= kawasan&i=10648>.

Tabel 1.3 Data Penduduk per kecamatan Terpadat di Kota Bandar Lampung.

No.	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk per km ²
1	Tanjung Karang Timur	19.633
2	Bumi Waras	16.250
3	Tanjung Karang Pusat	13.557
4	Teluk Betung Utara	12.549
5	Teluk Betung Selatan	11.151
Jumlah		73.140

Sumber: Bandar Lampung dalam Angka, 2020.

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa di Kota Bandar Lampung ada 5 kecamatan terpadat yaitu: Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Teluk Betung Selatan Sedangkan data jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung berumur 15 ke atas pada tahun 2019 yang hanya tamat sekolah dasar ada sebanyak 105.906, dari jumlah tersebut yang bekerja ada sebanyak 101.674 dan menganggur sebanyak 4.232 orang. Sementara jumlah SMP Negeri tidak sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk yang ada di masing-masing kecamatan tersebut seperti dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Jumlah SMP Negeri pada Kecamatan yang Penduduknya Terpadat

No.	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk per km ²	Jumlah SMP Negeri
1	Tanjung Karang Timur	19.633	1
2	Bumi Waras	16.250	1
3	Tanjung Karang Pusat	13.557	2
4	Teluk Betung Utara	12.549	4
5	Teluk Betung Selatan	11.151	2

Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, 2020.

Berdasarkan data Tabel 1.4 di atas diketahui jumlah SMP Negeri yang terbanyak ada di kecamatan yang penduduknya kurang padat yaitu : di kecamatan Enggal 5 buah SMP Negeri, diikuti kecamatan Teluk Betung Utara, kecamatan Kemiling, dan kecamatan Sukarame masing-masing 4 buah SMP Negeri, serta di kecamatan Panjang ada sebanyak 3 buah SMP Negeri (Tabel 1.5).

Tabel 1.5 Jumlah SMP Negeri yang paling banyak per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah SMP Negeri	Kepadatan Penduduknya
1	Enggal	5	8.643
2	Teluk Betung Utara	4	12.549
3	Kemiling	4	2.908
4	Sukarame	4	4.144
5	Panjang	3	5.067

Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, 2020.

Jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung tahun 2019 ada sebanyak 8,71 % dari jumlah penduduk 1.051.500 orang atau sekitar 91.586 orang. Kalau dilihat dari kelompok umur 10-14 tahun (SMP), ada sebanyak 85.184 orang, yang kalau diambil 8,71 % ada sebanyak 7.420, dengan tingkat IPM sebesar 77,33 %.

Tabel 1.6 Jumlah Anak Usia 10-14 Th (Tingkat SMP) di 5 Kecamatan Terpadat Kota Bandar Lampung.

No.	Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk per km ²	Anak Usia 10-14 Th
1	Tanjung Karang Timur	19.633	2.423
2	Bumi Waras	16.250	2.006
3	Tanjung Karang Pusat	13.557	1.673
4	Teluk Betung Utara	12.549	1.549
5	Teluk Betung Selatan	11.151	1.376
Jumlah			9.027

Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, 2020.

Apabila dari data zonasi tersebut dikaitkan dengan kecamatan lokasi tempat SMP Negeri, maka nampak bahwa ada beberapa SMP Negeri yang zonasinya tidak sesuai dengan kecamatan dimana SMP tersebut berada, seperti SMP N.3, SMP N.6, SMP N.8, SMP N.11 dan SMP N.23. Sementara TBB dan TBT yang berada di Zona 8 hanya memiliki 1 SMP Negeri yang lokasinya sesuai dengan zona yang ditentukan, yaitu SMP N.15.

Di Bandar Lampung,²⁰ orang tua atau wali murid meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tahun pelajaran 2019/2020. Banyak masyarakat yang merasa keberatan terkait regulasi tersebut karena dirasa tidak mengakomodir anak-anaknya untuk masuk di sekolah negeri. Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Aji Alriandi (33) Wali Murid yang mendaftarkan keponakannya Bintang Amalia di SMP Negeri menggunakan jalur zonasi reguler. Namun Bintang Amalia belum beruntung karena tidak diterima di 3 SMP Negeri pilihannya yakni SMPN 19 Bandar Lampung, SMPN 8 Bandar Lampung dan SMPN 20 Bandar Lampung berdasarkan pengumuman kelulusan PPDB SMP Negeri. Bintang Amalia yang berdomisili berada di Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang. memiliki rata-rata nilai yang baik yaitu Nilai Rapor 80, Nilai Ujian Sekolah 86, Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional 87,6 dan rata-rata nilai sekolah 90,8 di SD Negeri 3 Perumnas Way Kandis. Nilai bagus tapi tidak masuk sekolah negeri tetapi gara-gara jarak. Terpaksa ke swasta,".

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Daniel Marsudi mengatakan pihaknya mengikuti aturan yang ada. Pihaknya pun mengevaluasi dan menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait PPDB bahwa anaknya tidak masuk kesekolah negeri. Ia mengatakan PPDB sudah tersistem yang bekerjasama dengan PT. Telkom. Ia juga

²⁰ <https://www.lampost.co/berita-wali-murid-minta-ppdb-smp-dievaluasi.html>

mengatakan para petugas disekolahpun sudah menandatangani fakta integritas untuk menjalani tugas, pokok dan fungsinya sesuai aturan. "Kita sudah sesuai zonasi, bila ada yang tidak diterima mungkin karena domisilinya jauh dari sekolah. Tidak ada yang bisa macam-macam dalam aplikasi, pendidikan kita akan rusak kalau ngacak-ngacak sistem,".

Jalur masuk untuk SMP Negeri meliputi jalur zonasi bina lingkungan (keluarga tidak mampu), zonasi reguler dengan sistem online, jalur prestasi dan jalur pindah pekerjaan orang tua. Pengumuman kelulusannyapun sudah dilakukan. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang maka diwajibkan hadir disekolah masing-masing untuk mengikuti persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan dilanjut untuk MPLS.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Syarief Hidayat, penerimaan melalui program biling ini ternoda, karena banyak siswa berduit yang mendadak miskin agar diterima di sekolah favorit melalui program ini.²¹ Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka menurut Suharsimi Arikunto,²² program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu: (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Mengacu kepada pengertian tersebut, maka program siswa bina lingkungan yang digagas oleh pemerintah kota Bandar

²¹ [http://www.sinarharapan .co/ news/read/150626002/loloskan-siswa-kaya-program-biling-diprotes](http://www.sinarharapan.co/news/read/150626002/loloskan-siswa-kaya-program-biling-diprotes).

²² Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.4.

Lampung telah memenuhi ketiga kriteria di atas, yaitu: (1) merupakan implementasi dari kebijakan pendidikan dalam memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat yang kurang kemampuan untuk memperoleh pendidikan yang layak, (2) terjadi dalam waktu yang relatif lama merupakan kegiatan yang berkesinambungan mulai dari tahun 2012 sampai sekarang, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang, yaitu adanya kepanitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP Negeri di Bandar Lampung.

Sejak digulirkannya program biling pada SMP Negeri di Bandar Lampung sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program biling atau dampak program biling bagi siswa yang dievaluasi secara menyeluruh (komprehensif), yaitu mulai dari rekrutmen siswa biling, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi kelulusan dari peserta didik. Oleh karena itu, maka penelitian evaluasi (*evaluation research*) ini dilakukan dengan fokus pada evaluasi implementasi program.

Ada beberapa masalah sejak digulirkannya program biling sampai saat ini seperti dikutip oleh koran republika, diantaranya:²³

- 1) Semakin berkurangnya jatah kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) regular, sedangkan kuota biling bertambah, serta bertambahnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 2) Terdapat anak dari keluarga mampu yang diterima melalui jalur biling, sebaliknya dari keluarga tidak mampu atau miskin tidak diterima di sekolah negeri

Program merupakan suatu sistem. Dimana sistem, menurut Suharsimi Arikunto adalah:²⁴ satu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen yang saling kait-mengait dan

²³ <https://republika.co.id/berita/koran/politik-koran/nr3vg735/ppdb-sisakan-masalah-jalur-biling>.

²⁴ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.9.

bekerja sama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan komponen program adalah: bagian-bagian yang menunjukkan napas penting dari keterlaksanaan program. Untuk program siswa bina lingkungan, maka komponen programnya adalah: (1) isi kegiatan, antara lain tujuan program siswa bina lingkungan, tempat kegiatan dan jadwal pelaksanaannya, (2) jumlah dan persyaratan peserta, (3) komposisi panitia dan ketepatan kemampuan para personilnya, (4) sarana pendukung yang ditentukan oleh isi kegiatan, (5) dana yang diperlukan, dan (6) kelancaran pelaksanaan. Kegiatan evaluasi program siswa bina lingkungan ini, meliputi kegiatan evaluasi mulai dari input, proses sampai dengan output dari program siswa biling tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program merupakan bagian yang sangat penting untuk melihat efektif dan efisien dari pada hasil program tersebut, yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait dengan tujuan program tersebut. menurut prof .Dr.H. Ramayulis dalam bukunya ilmu pendidikan islam, evaluasi pendidikan islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan islam.²⁵ Dalam Qur'an surat Al-Ankabut, ayat 2-3:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ط فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”

²⁵ Ramaliyus. 2004. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

Qur'an surat An-Naml, ayat: 27:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: “berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang dusta.”

Dan Qur'an surat: As-shaffat, ayat: 39:

وَمَا نُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.”

Sebagai manusia yang beriman kita yakin dan percaya bahwa setiap ucapan, tingkah laku dan amal perbuatan kita akan diuji oleh Allah subhanahu wata'ala. Termasuk seluruh aktivitas dalam dunia pendidikan seperti pelaksanaan program bina lingkungan tidak terlepas dari ujian dan pengawasan Allah subhanahu wata'ala.

B. FOKUS DAN SUBFOKUS PEMBAHASAN

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang dibahas di sini berkaitan dengan pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, sebagai upaya pembenahan dan pengembangan manajemen pendidikan di sekolah yang belum berjalan secara efektif. Berdasarkan fokus masalah tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam sub fokus sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan program bina lingkungan;
2. Komponen masukan program bina lingkungan;
3. Komponen proses program bina lingkungan;
4. Komponen keluaran program bina lingkungan; dan
5. Komponen *outcome* program bina lingkungan.

C. PERMASALAHAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Berdasarkan fokus masalah dan sub fokus masalah penelitian yang dipaparkan di atas, kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan program bina lingkungan yang meliputi aspek tujuan program bina lingkungan; kebutuhan sumber daya; dan masalah sumber daya?
2. Bagaimana memperoleh masukan program bina lingkungan yang mencakup aspek siswa; guru; kurikulum; sarana prasarana; pembiayaan; dan lingkungan belajar?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program bina lingkungan yang mencakup aspek proses penerimaan; proses seleksi; dan proses pembelajaran?
4. Bagaimana mengukur luaran program bina lingkungan yang mencakup prestasi akademik atau hasil belajar siswa, dan prestasi non akademik atau ekstra kulikuler?
5. Bagaimana cara mengidentifikasi outcome/tindak lanjut dari program bina lingkungan yang mencakup jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut; dan jumlah lulusan yang bekerja?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN KAJIAN

a. Tujuan Kajian Program Bina Lingkungan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kajian program bina lingkungan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, dengan lima ruang lingkup yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan perencanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan masukan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
3. Mendeskripsikan proses pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.

4. Mendeskripsikan luaran program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
5. Mendeskripsikan cara mengidentifikasi outcome program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.
- b. Kegunaan Kajian Program Bina Lingkungan

Manfaat yang diharapkan dari pengkajian evaluasi pelaksanaan program bina lingkungan pada SMTP Negeri di Kota Bandar Lampung ini: Pertama dapat memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen pendidikan termasuk pendidikan Islam yang inovatif dan aplikatif berbasis tuntutan zaman sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam mempersiapkan masa depan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, dapat merumuskan sistem evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas, yang dapat membantu para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Ketiga, sebagai rujukan bagi praktisi pendidikan dalam menggali potensi/sumber daya pendidikan untuk mendesain program pendidikan. Keempat, dapat digunakan oleh para penanggung jawab pendidikan sebagai panduan untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.



KAJIAN TEORETIK

A. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Pembahasan mengenai kebijakan publik (*public policy*) dilihat dari berbagai sumber, diantara sumber yang membahas *public policy* diambil dan dikutip dari berbagai pakar, baik yang terdapat dalam buku teks, maupun yang terdapat pada jurnal ilmiah. Paparan berikut ini dikutip sebagai mana menurut:

- 1) Imron pada tahun (2008)²⁶ mengutip kembali Anderson (1979) yang memberikan pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah (*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*). Selain itu juga mengutip Easton (1953) yang memberikan pengertian kebijaksanaan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara authoritative kepada anggota masyarakat (*The authoritative allocation of values for the whole society*).
- 2) Edward III (1978) menyatakan bahwa kebijaksanaan negara adalah apa yang dinyatakan atau tidak dinyatakan oleh pemerintah (... *is what government say and done, or do not*),

²⁶ Imron, Ali, 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk & Masa Depan*, Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta.

maksudnya adalah segala sesuatu tindakan dan pernyataan atas nama pemerintah disebut sebagai kebijaksanaan negara, hal ini juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Dye (1972) bahwa kebijaksanaan negara adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (... is whatever governments choose to do or not to do).

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Pembahasan tentang program bina lingkungan diuraikan dengan memberikan penjelasan tentang pengertian program, bina lingkungan, tujuan bina lingkungan dan dampak bina lingkungan.

a. Pengertian program

Program, dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto,²⁷ diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Adapun kebijakan²⁸ adalah suatu kearifan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada bawahan atau masyarakat karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.

²⁷ Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, 2010. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.4.

²⁸ Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk & Masa Depan, Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta, Ed.1., Cet. 3, hal. 17.

b. Pengertian Program Bina Lingkungan

Kata bina menurut KBBI²⁹ berarti bangun, membina; membangun, sedangkan lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti sekeliling; sekitar; selingkung; seluruh suatu lingkaran daerah, dan sebagainya. Jadi bina lingkungan dapat diartikan membina atau membangun di sekeliling atau sekitar suatu lingkaran daerah tertentu seperti membangun daerah lingkungan sekolah.

Sehingga program bina lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Bandar Lampung dalam membina atau membangun suatu lingkungan dalam hal ini sekolah melalui pemberdayaan atau pemerataan pendidikan terhadap siswa miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

Siswa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pelajar baik pria maupun wanita. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pengertian siswa miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan kriteria orang tua atau kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, tidak berpenghasilan tetap dan penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan-minum 3 kali sehari dengan jumlah keluarga 4 orang, tempat tinggal dari dinding kayu/tembok yang tidak sempurna, lantai masih berupa tanah/plesteran, telah mendapatkan kartu raskin.

Sedangkan untuk keluarga tidak mampu, mereka telah bekerja tetap akan tetapi penghasilannya kurang/tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak mendapatkan kartu raskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setempat dan membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah.

Siswa bina lingkungan, menurut Perwali No. 49 tahun 2013 bab V bagian kesatu pasal 10 ayat 3 adalah siswa dari

²⁹ Suharso dan Retnoningsih, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, Penerbit: CV. Widya Karya: Semarang.

keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung. Sehingga program bina lingkungan ini adalah suatu program dari pemda Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada siswa dari keluarga belum mampu yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah pilihan dan resmi sebagai warga kota Bandar Lampung.

c. Tujuan Bina Lingkungan

Program bina lingkungan diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik bina lingkungan yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya pada tiap satuan pendidikan diharapkan mendaftar pada sekolah lanjutan yang berdekatan dengan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Berdasarkan peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2013 pasal 12 paragraf 2 pasal 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanggal 11 Juni 2013 (1) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program paket A, dan dapat juga dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah, serta memberikan prioritas sampai dengan 50 (lima puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. (2) apabila kriteria pada ayat 1 di atas tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes skolastik atau tes potensi akademik.

d. Prinsip Penyelenggaraan Bina Lingkungan

Prinsip penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru untuk program bina lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2020/2021

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara objektif; b) Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi; c) Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; d) Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi.

PPDB tahun pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bandar Lampung, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk kepanitiaan ditingkat kota Bandar Lampung selaku coordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana, dengan susunan kepanitiaan di satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Ruang lingkup tugas panitia tingkat kota meliputi: 1) menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru; 2) merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; 3) membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat; 4) mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru; 5) melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Sedangkan ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah: 1) menyediakan nomor Whatapps panitia dan perangkat pendaftaran lainnya; 2) menerima pendaftaran peserta didik melalui nomor Whatapps dan aplikasi pendaftaran; 3) memeriksa keabsahan dokumen

pendaftaran; 4) mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri; 5) memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi; 6) menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima; 7) menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; 8) memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan; 9) membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

e. Persyaratan Siswa Bina Lingkungan

Calon peserta didik SMP Negeri dari jalur bina lingkungan harus memenuhi kelengkapan administrasi yang terdiri dari, syarat umum: a) telah lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat; b) SKHU asli Sekolah Dasar atau yang sederajat; c) terhitung sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 calon peserta didik baru berusia tidak lebih dari 16 tahun; d) bagi calon peserta didik pindahan yang berasal dari luar rayon kota Bandar Lampung melampirkan surat persetujuan pindah rayon dari sekolah asal dan surat persetujuan menerima dari Kepala Sekolah yang dituju.

Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu: a) memenuhi semua persyaratan umum PPDB tahun pelajaran 2020/2021; b) diperuntukkan hanya untuk warga Bandar Lampung; c) ikut serta peserta dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang ditanda tangani oleh Lurah (Tidak Boleh atas Nama); d) Kartu Keluarga dan KTP asli kedua orangtuanya; e) Surat Pernyataan dari orang tua bermaterai Rp.6000 bahwa bersedia dinyatakan gugur apabila data yang dikirimkan rekayasa atau palsu; f) menyerahkan foto rumah yang ditempati; tampak depan, tampak belakang, tampak kanan dan tampak kiri; g) bersedia diverifikasi ke rumah calon peserta didik (home visit) oleh panitia; h) hanya diperkenankan memilih 1 sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal; i) semua berkas

tersebut diatas difoto kemudian dikirimkan ke nomor whatapps panitia PPDB di sekolah yang dituju.

f. Tahapan Program Bina Lingkungan

Keputusan program bina lingkungan didasarkan pada perwali dilanjutkan dengan pembentukan panitia PPDB, yang terdiri dari panitia di tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan pada SMP Negeri se kota Bandar Lampung. Panitia di tingkat kota melaksanakan kegiatan meliputi: 1) menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru; 2) merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; 3) membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat; 4) mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru; 5) melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

Sedangkan ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah: 1) menyediakan nomor Whatapps panitia dan perangkat pendaftaran lainnya; 2) menerima pendaftaran peserta didik melalui nomor Whatapps dan aplikasi pendaftaran; 3) memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran; 4) mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri; 5) memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi; 6) menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima; 7) menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; 8) memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, dan; 9) membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan jadwal penyelenggaraan yang telah ditentukan calon peserta didik melakukan pendaftaran dengan memfoto berkas-berkas pendaftaran dan mengirimkan foto-foto tersebut ke nomor whatapps Panitia PPDB Sekolah yang telah ditentukan, selanjutnya pihak sekolah/ panitia tingkat satuan

pendidikan melakukan input dan memverifikasi data calon peserta didik yang mendaftar dan hasil verifikasi diberi skor. Selanjutnya dibawa ke ruang rapat untuk diputuskan apakah calon peserta didik tersebut dapat diterima atau tidak diterima melalui jalur bina lingkungan. Bagi peserta yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan mengisi data pendaftaran ulang pada aplikasi PPDB Kota Bandar Lampung, sedangkan yang tidak dapat diterima melalui jalur bina lingkungan dapat mengikuti seleksi melalui jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali yang jadwal seleksinya setelah proses PPDB jalur bina lingkungan selesai dilaksanakan.

g. Dampak Bina Lingkungan

Terkait dengan dampak kebijakan, menurut Dye (1981) yang dikutip oleh Antoius Tarigan³⁰, dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Sementara menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Pada dasarnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai solusi pemecahan masalah public dan untuk kepentingan public diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Program bina lingkungan sebagai salah satu program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung di bidang pendidikan diharapkan memberikan dampak positif seperti adanya pemerataan kesempatan belajar bagi keluarga yang kurang mampu, mengurangi tingkat pengangguran pada usia anak-anak dan remaja, dan lain-lain.

³⁰ Tarigan, Antonius yang dikutip dari: https://www.academia.edu/4447903/mencermati_dampak_kebijakan_publik_dalam_program_penanggulangan_kemiskinan.

C. EVALUASI PROGRAM

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi, berasal dari kata bahasa Inggris “evaluation” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan menentukan nilai suatu objek. Adapun menurut Nanang Fattah,³¹ evaluasi adalah: pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Anas Sudiono,³² *Evaluation refer to the act or process to determining the value of something*, yang mengandung pengertian; sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Suharsimi Arikunto,³³ diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan menilai tentang suatu objek, dalam hal ini objek yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah berupa program bina lingkungan, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Evaluasi program, menurut Suharsimi Arikunto adalah:³⁴ upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam

³¹ Nanang Fattah, 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya: Bandung, cet. Ke 7, hal. 107.

³² Anas Sudijono, 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Penerbit: PT Rajagrafindo Persada; Jakarta, h. 1.

³³ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.2.

³⁴ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.17.

mendukung pencapaian tujuan program. Evaluasi program, merupakan suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Terkait dengan kebijakan, Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar mendefinisikan evaluasi program adalah:³⁵ upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Secara lebih rinci, kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah:³⁶ 1) terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, 2) terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan 3) terbukanya untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.

³⁵ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.18.

³⁶ Anas Sudijono, 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Penerbit: PT Rajagrafindo: Jakarta, h. 17.

Komponen program,³⁷ pada umumnya dapat ditentukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan fungsional. Unsur-unsur program biling menurut pendekatan struktural terdiri dari: 1) tujuan program biling, 2) seleksi dasar kegiatan PPDB, 3) rasional dan pendekatan terhadap evaluasi, dan 4) karakteristik siswa. Sedangkan unsur-unsur program menurut pendekatan fungsional adalah: 1) iklim sekolah, 2) sistem penunjang administrasi, 3) karakteristik guru, dan 4) gaya implementasi.

Karena itu, menurut William N. Dunn evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik, antara lain:³⁸ 1) fokus nilai, evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi, 2) interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi, 3) orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante), 4) dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara untuk mencapai tujuan-tujuan lain.

Dalam perspektif Islam, setiap kegiatan program harus dilakukan evaluasi, sebagaimana disebutkan dalam qs. Al-Zalzalah (99) ayat: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

³⁷ Nanang Fattah, 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya: Bandung, cet. Ke 7, hal. 109.

³⁸ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed.2. Penerbit: Gadjah Mada University Press, h.608.

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah niscaya dia akan melihat balasannya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula.”

Dalam Al-Quran dan Al-Hadits banyak kita temui tolak ukur dalam pendidikan islam. Misalnya tolak ukur shalat yang sempurna adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.

Terdapat makna evaluasi dalam Al-Quran, diantaranya:

1. Al-Hisab

Memiliki makna mengira, menafsirkan menghitung, dan menganggap, misalnya dalam Al-Quran :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ

يَنْشَءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَنْشَءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 284).

Makna ayat tersebut adalah: Hanya milik Allah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia lah yang menciptakan, menguasai dan mengaturnya. Apabila manusia memperlihatkan atau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang setimpal dengan itu. Kemudian Allah akan mengampuni orang yang dikehendaki-Nya berkat kemurahan dan kasih sayang-Nya. Dan Dia akan menyiksa orang yang Dia kehendaki berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

2. Al-Bala

Memiliki makna cobaan ujian. Misalnya dalam al-quran: surat al-mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”,

Memiliki makna bahwa: Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia, siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Dia Maha Perkasa, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan-Nya, Maha Pengampun atas dosa-dosa hamba-Nya yang bertobat kepada-Nya.

3. Al-hukm

Memiliki makna putusan atau vonis misalnya dalam al-quran surat an-naml ayat 78:

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

“Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.

Makna dari ayat ini adalah: “Sesungguhnya Allah akan mengadili di antara manusia -baik yang beriman maupun yang kafir- pada hari Kiamat dengan hukum-Nya yang adil, maka Dia merahmati orang yang beriman dan menyiksa orang yang kafir, dan Dia Maha Perkasa yang membalas setiap musuh-musuh-Nya dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan-Nya, Maha Mengetahui yang tidak kabur bagi-Nya mana yang benar dan mana yang batil.”

4. Al- qodo

Memiliki arti putusan misalnya dalam al-quran surat toha ayat 72:

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ

الدُّنْيَا

Mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.”

Ayat ini bermakna bahwa: Para tukang sihir di zaman Fir'aun berkata kepada Fir'aun, "Kami tidak akan pernah mengutamakan rasa tunduk dan taat kepadamu dari pada ketundukan terhadap bukti-bukti nyata/mukjizat yang datang kepada kami. Kami tidak akan pernah mengutamakanmu dari Allah yang telah menciptakan Kami, maka lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan pada kami sekehendakmu, sesungguhnya engkau tidak memiliki kekuasaan atas kami kecuali hanya dalam kehidupan dunia ini, dan kekuasaanmu itu pasti akan sirna.

5. An-Nazhar

Memiliki makna melihat misalnya dalam al-Quran surat An-Namal ayat 27:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.

Makna dari ayat tersebut adalah: Sulaiman berkata kepada hud-hud, “Kami akan analisa berita yang kamu bawa kepada kami, apakah kamu berkata jujur dalam perkara itu ataukah

kamu termasuk orang-orang yang berdusta padanya. Pergilah dengan membawa suratku ini kepada penduduk negeri Saba' itu, dan berikan surat itu kepada mereka, lalu menyingkirilah kamu dengan jarak yang masih dekat dari mereka di mana kamu tetap bisa mendengar perkataan mereka. Lalu perhatikanlah perbincangan yang terjadi diantara mereka.”

Beberapa hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya pelaksanaan evaluasi dalam setiap pekerjaan. Islam mengajarkan agar memperhatikan adanya bentuk evaluasi terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ووزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا (الحديث)

Yang artinya periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Karena evaluasi berfungsi untuk membimbing manusia agar meningkatkan kualitas kerja, sebagaimana penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas). (HR. Thabrani).

b. Manfaat Evaluasi

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara formal dan informal³⁹ Evaluasi informal terjadi apabila seseorang memilih antara beberapa pilihan dan secara informal memilih. Misalnya memilih menu di restoran, atau seseorang menanyakan menu kepada pelayan restoran apa saja yang sedang populer. Evaluasi informal semacam ini pilihan amat subjektif tergantung pada persepsi si pemilih tentang pilihan yang terbaik. Tetapi evaluasi

³⁹ Tayibnapis, Farida Yusuf, 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian, Penerbit: PT. Rineka Cipta: Jakarta.

formal menggunakan pendekatan evaluasi yang sistematis dalam merumuskan kriteria untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pilihan-pilihan tersebut.

Menurut Worten, dkk., dalam Tayibnapis, evaluasi formal telah memegang peranan penting dalam pendidikan, antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk: 1) membuat kebijaksanaan dan keputusan; 2) menilai hasil yang dicapai para pelajar; 3) menilai kurikulum; 4) memberi kepercayaan kepada sekolah; 5) memonitor dana yang telah diberikan; dan 6) memperbaiki materi dan program pendidikan.

Terdapat hubungan yang erat antara evaluasi program dengan kebijakan, dimana program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi, maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana.⁴⁰ Evaluasi juga penting dilakukan agar kita tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama.⁴¹ Menurut Yusuf tidak sedikit dari kita yang melakukan kesalahan, dan itu terkadang berulang-ulang. Di antara sebab utamanya adalah kita tidak mau terbuka dan jujur untuk mengevaluasi, karena merasa evaluasi adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Kita terus menerus dikritik dan disalahkan. Padahal jika kita berpikir positif, evaluasi adalah cara tercepat agar Anda menjadi yang terbaik.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program inilah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (*decision maker*). Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam

⁴⁰ Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul, 2010. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta, Edisi Kedua.

⁴¹ Yusuf, Nanang Qosim, 2011. 21 Days to be Trans human Panduan Menjadi Manusia di atas rata-rata, Penerbit: Zaman; Jakarta.

pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu: 1) menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; 2) merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit); 3) melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat; 4) menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

c. Model-Model Evaluasi

Model evaluasi menurut Tayibnapis (2000)⁴² ialah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya. Disamping itu ada ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya. Selain itu evaluasi juga dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya.

Dari banyak model evaluasi, menurut Tayibnapis (2000) ada beberapa model yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program, yaitu:

1. Model Evaluasi CIPP

Stufflebeam (1969, 1971, 1983, Stufflebeam & Shinkfield, 1985) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan untuk menolong administrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai “Suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternative keputusan.”

⁴² Tayibnapis, Farida Yusuf, 2000. *Evaluasi Program*, Penerbit: Rineka Cipta: Jakarta.

2. Evaluasi Model UCLA

Alkin (1969) menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternative.

3. Model Brinkerhoff

Brinkerhoff & Cs. (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri, sebagai berikut: 1) Fixed vs Emergent Evaluation Design. 2) Formative vs Summative Evaluation, dan 3) Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/Unobtrusive Inquiry.

4. Model Stake atau Model Countenance

Analisis proses evaluasi yang dikemukakan oleh Stake (1967) membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu: Description dan judgment dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu: Antecedents (Context), Transaction (Process), dan Outcomes (Output).

Sedangkan Arikunto dan Jabar (2010)⁴³ Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang bisa

⁴³ Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2010. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua: Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta.

digunakan untuk mengevaluasi suatu program.⁴⁴ Meskipun antara satu dengan lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam melakukan tindak lanjut suatu program. Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Dalam hal ini Stephen Isaac (1986 dalam Fernandes 1984) mengatakan bahwa model-model tersebut diberi nama sesuai dengan fokus atau pendekatannya. Lebih jauh Isaac membedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu: (1) berorientasi pada tujuan program – goal oriented, (2) berorientasi pada keputusan – decision oriented, (3) berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya – transactional oriented, dan (4) berorientasi pada pengaruh dan dampak program – research oriented.

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.
2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.
3. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.
4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
5. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
6. CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
7. CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4. Hal.40.

8. Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provus. Adapun uraian dari beberapa model-model dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Goal Oriented Evaluation Model

Goal oriented evaluation model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

2. Goal Free Evaluation Model

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai, dalam model goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya memang tidak diharapkan).

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memerhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang

diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “evaluasi lepas dari tujuan” dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.

3. Formatif-Summatif Evaluation Model

Selain model “evaluasi lepas dari tujuan”, Michael Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif-summatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi summatif).

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi summatif. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang “apa, kapan, dan tujuan” evaluasi tersebut dilaksanakan.

Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk

mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda.

4. Countenance Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandes (1984), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu: (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgments); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu: (1) anteseden (antecedents/context), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-outcomes).

5. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.

Model ini menurut Robert O. Brinkerhoff, et.al., sebagai mana dikutip oleh Arifin, Zainal (2010; 12) menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (preliminary understanding) peserta didik dan mengembangkan disain atau model. Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsive terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsive adalah pengumpulan dan sintesis data.

Kelebihan model ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuannya mengakomodasi pendapat yang ambigius serta tidak focus. Sedangkan kekurangannya antara lain (1) pembuat keputusan sulit menentukan prioritas atau penyederhanaan informasi (2) tidak mungkin menampung semua sudut pandangan dari berbagai kelompok (3) membutuhkan waktu dan tenaga. Evaluator harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang diamati.⁴⁵

6. CSE-UCLA Evaluasi Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu: CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984) memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu: (1) needs assessment, (2) program planning, (3) formative evaluation, dan (4) summative evaluation.

7. CIPP Evaluation Model

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

Context evaluation: evaluasi terhadap konteks.

Input evaluation : evaluasi terhadap masukan.

Process evaluation : evaluasi terhadap proses.

Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah

⁴⁵ Arifin, Zainal, 2010. Makalah: Model-model Evaluasi Program, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI-Bandung.

komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

d. Perencanaan Program

Rencana program menurut Muhaimin, et.al. (2009) merupakan penjabaran perinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Penjabaran rencana program harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijaksanaan.⁴⁶

Menurut Muhaimin, et.al. (2009) rencana program dikembangkan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana suatu visi dapat dicapai. Rencana program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi utama organisasi. Rencana program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Rencana program menurut Muhaimin et.al. (2009) tidak terlepas dari strategi utama sekolah/madrasah yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana program meliputi program kerja untuk mengimplementasikan sasaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh kebijakan organisasi. Untuk suatu bidang atau unit kerja, maka rencana program didasarkan atas perumusan visim misi, tujuan, sasaran, dan kebijaksanaan yang ada hubungannya dengan segala aspek fungsi bidang atau unit kerja yang bersangkutan. Agar rencana program dapat dilaksanakan

⁴⁶ Muhaimin, et.al. 2009. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.

secara realistis, maka menurut Muhaimin, et.al. (2009) diperlukan upaya-upaya:

- a. Penentuan pimpinan mengenai sejauhmana tingkat keterkaitan (atau hubungan) antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi utama sekolah/madrasah dengan rencana program. Pimpinan harus mengupayakan suatu keterkaitan yang menimbulkan keseimbangan antara program-program yang bersangkutan.
 - b. Koordinasi atas rencana program tidak perlu secara menyeluruh akan tetapi cukup dilakukan terhadap program kerja yang memang penting saja, hal ini dilakukan untuk mengurangi kebebasan dan motivasi pegawai.
 - c. Rencana program hendaknya cukup sederhana.
 - d. Setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan mengajukan rencana programnya masing-masing.
 - e. Harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja hanya merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau akan tetapi yang lebih penting adalah yang berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang.
 - f. Rencana program dibuat dengan memerhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah.
- e. Perencanaan program bina lingkungan

Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari tahap-tahap dalam siklus PDCA⁴⁷ yaitu:

1. Tahap Plan
2. Tahap Do
3. Tahap Check
4. Tahap Act.

⁴⁷ Sedarmayanti, 2012. Good Governance “Kepemerintahan yang baik” Bagian Kedua, Edisi Revisi, Penerbit: Mandar Maju: Bandung.

f. input program

Program penerimaan siswa baru sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses dan output (Usman, Husaini: 2009)⁴⁸ dimana kuantitas dan kualitas calon siswa merupakan salah satu input bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah⁴⁹ termasuk program penerimaan siswa baru.

g. proses program

Menurut Nizarman (2015) secara umum penerimaan siswa baru (PSB) dapat diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

h. output program

Dalam memandang organisasi sebagai suatu sistem (Usman, Husaini: 2009), kualitas dan kuantitas siswa yang diterima merupakan output dari proses seleksi penerimaan siswa baru (PSB) (Nizarman (2015).

i. outcome program

Sebagai suatu sistem (Usman, Husaini: 2009), maka outcome dari program penerimaan siswa baru ini adalah kualitas dan kuantitas lulusan dari sekolah yang bersangkutan.

8. Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provus.

Kata discrepancy adalah istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

⁴⁸ Usman, Husaini, 2009. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 3, Jakarta: Bumi Aksara.

⁴⁹ Nizarman, 2015. Manajemen Penerimaan Siswa Baru, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.9 No.2 Maret 2015, hal. 224-234, diupload dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/download/1116/925>.

Dari beberapa model evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitian ini lebih memilih menggunakan model evaluasi CIPP dari pada ke tujuh model evaluasi lainnya, dengan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Model evaluasi CIPP, sesuai pendapat Arikunto adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem,⁵⁰ berbeda dengan model goal oriented yang hanya berorientasi pada tujuan atau goal free oriented model yang tidak mementingkan tujuan melainkan pada proses, begitu juga pada model formatif evaluasi harus dilaksanakan ketika program berlangsung, sedangkan pada model summative evaluasi baru dapat dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan;
- 2) Sedangkan menurut Pratama, model ini dipilih karena dianggap lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya.⁵¹ Model CIPP meliputi komponen-komponen mulai dari Context (meliputi tujuan dan kebutuhan program), Input, proses dan produk dari program yang dilakukan.
- 3) Selanjutnya, menurut Stufflebeam, dalam Marvin C. Alkin (2004; h. 247)⁵² mengungkapkan bahwa, “*The CIPP model emphasizes that evaluation’s most important purpose is not to prove, but to improve*”, yakni evaluasi model CIPP adalah lebih bertujuan pada upaya memperbaiki (to improve), bukan membuktikan (to prove). Pada istilah “to improve” terkandung makna bahwa sebuah keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan apa yang dianggap paling berharga atau bernilai.

⁵⁰ Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul, 2010. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan: Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Kedua.

⁵¹ Dinar Pratama, <https://dinarpratama.wordpress.com/2010/11/20/model-evaluasi-cipp-context-input-process-product/>

⁵² Daniel L. Stufflebeam dalam Alkin, Marvin C., 2004. Evaluation Roots, penerbit: Sage Publications: London, h. 247.

D. KRITERIA EVALUASI

a. Pengertian Kriteria

Istilah “kriteria” dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata “tolok ukur” atau “standar”. Dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat segera dipahami bahwa kriteria, tolok ukur, atau standar, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat disamakan dengan “takaran”. Jika untuk mengetahui berat beras digunakan timbangan, panjangnya benda digunakan meteran, maka kriteria atau tolok ukur digunakan untuk menakar kondisi objek yang dinilai.

Tentang batas yang ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang mengatakan bahwa tolok ukur adalah “batas atas”, artinya batas maksimal yang harus dicapai. Sementara sebagian orang lainnya mengatakan bahwa tolok ukur atau kriteria adalah “batas bawah”, yaitu batas minimal yang harus dicapai. Dapat disimpulkan bahwa kriteria atau tolok ukur itu bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas di antaranya. Dengan demikian, kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan, dan ditunjukkan dalam bentuk kata keadaan atau predikat.

Permasalahan di dalam kriteria evaluasi program adalah aturan tentang bagaimana menentukan peringkat-peringkat kondisi sesuatu atau rentangan-rentangan nilai, agar data yang diperoleh dapat dipahami oleh orang lain dan bermakna bagi pengambil keputusan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Jika evaluator tidak berniat membuat kriteria khusus, sebaiknya menggunakan kriteria yang sudah lazim digunakan dan dikenal oleh umum, misalnya skala 1-10 atau skala 1-100.

Dari mana sebuah angka diperoleh atau bagaimana menentukan suatu angka? Misalnya seorang guru memberikan nilai akhir untuk pengisian rapor adalah angka 7. Untuk menentukan angka 7 tersebut seorang guru mempertimbangkan beberapa hal. Komponen yang membentuk nilai misalnya

ulangan harian, ulangan umum, dan tugas-tugas. Ketika guru menentukan nilai ulangan harian saja, sudah harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu benar-salahnya jawaban dan banyaknya soal yang dapat diselesaikan.

Jika kriteria untuk prestasi belajar menggunakan sepuluh jenjang penilaian, yaitu 1 sampai dengan 10, atau 1 sampai dengan 100 (meskipun tidak semua digunakan secara rutin), untuk nilai dalam evaluasi program pada umumnya menggunakan kriteria atau tolok ukur lima jenjang. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan tiga jenjang atau tujuh jenjang.

Apakah memang harus gasal? Tentang gasal dan genapnya jenjang kriteria ada kelebihan dan kekurangan. Jika jenjangnya gasal, berarti ada nilai di tengah untuk menyatakan “cukup” atau “sedang”. Ada sebagian ahli yang “mencurigai” penggunaan nilai tengah karena dikhawatirkan untuk responden yang ragu-ragu dalam menentukan pilihan, akan dengan cepat memilih nilai tengah. Untuk menghindari hal ini penyusun mencantumkan pilihan genap. Dengan demikian, penyusun tidak menyediakan pilihan nilai tengah. Untuk itu, banyaknya pilihan bisa 2, 4, atau 6. Jika pilihannya terlalu banyak, dikhawatirkan justru akan membingungkan responden dan dikatakan terlalu *njlimet*.

b. Alasan Pentingnya Kriteria

Kriteria atau tolok ukur perlu dibuat oleh evaluator karena evaluator terdiri dari beberapa orang yang memerlukan kesepakatan di dalam menilai. Selain alasan sederhana tersebut, ada beberapa alasan lain yang lebih luas dan dapat lebih dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Dengan adanya kriteria atau tolok ukur, evaluator dapat lebih mantap dalam melakukan penilaian terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang diikuti.
2. Kriteria atau tolok ukur yang sudah dibuat dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil

penilaian yang sudah dilakukan, jika ada orang yang ingin menelusuri lebih jauh atau ingin mengkaji ulang.

3. Kriteria atau tolok ukur digunakan untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri penilai. Dengan adanya kriteria maka dalam melakukan evaluasi, evaluator dituntun oleh kriteria, mengikuti butir demi butir, tidak mendasarkan diri atas pendapat pribadi (yang mungkin sekali “dikotori” oleh selernya).
 4. Dengan adanya kriteria atau tolok ukur maka hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik penilai yang berbeda pula. Misalnya penilai sedang dalam kondisi badan yang masih segar atau dalam keadaan lelah hasilnya akan sama.
 5. Kriteria atau tolok ukur memberikan arahan kepada evaluator apabila banyaknya evaluator lebih dari satu orang. Kriteria atau tolok ukur yang baik akan ditafsirkan sama oleh siapa saja yang menggunakannya.
- c. Dasar pembuatan kriteria

Yang dimaksud dengan istilah “dasar” dalam pembuatan standar atau kriteria adalah sumber pengambilan kriteria secara keseluruhan. Dengan pengertian bahwa kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai maka kriteria tersebut harus “top” kondisinya. Timbul pertanyaan, dari manakah yang “top” itu diambil? Mengingat banyaknya objek yang diukur dan dengan harapan serta kondisi yang berbeda-beda maka ada beberapa sumber pembuatan kriteria. Kriteria atau tolok ukur sebaiknya dibuat bersama, dan sebaiknya dibuat oleh orang-orang yang akan menggunakannya, yaitu calon evaluator, dengan maksud agar pada waktu menerapkannya tidak ada masalah karena mereka sudah memahami, bahkan tahu apa yang melatarbelakanginya.

1. Sumber Pertama

Apabila yang dievaluasi merupakan suatu implementasi kebijakan maka yang dijadikan sebagai kriteria atau tolok ukur adalah peraturan atau ketentuan yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan kebijakan yang bersangkutan. Apabila penentu kebijakan tidak mengeluarkan ketentuan secara khusus maka penyusun kriteria menggunakan ketentuan yang pernah berlaku umum yang sudah dikeluarkan oleh pengambil kebijakan terdahulu dan belum pernah dicabut masa berlakunya.

2. Sumber Kedua

Dalam mengeluarkan kebijakan biasanya disertai dengan buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak). Di dalam juklak tertuang informasi yang lengkap, antara lain dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan, prinsip, tujuan, sasaran, dan rambu-rambu pelaksanaannya. Butir-butir yang tertera di dalamnya, terutama dalam tujuan kebijakan, mencerminkan harapan dari kebijakan. Oleh karena itu, pedoman atau petunjuk pelaksanaan itulah yang distatuskan sebagai sumber kriteria.

3. Sumber Ketiga

Apabila tidak ada ketentuan atau petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan oleh penyusun sebagai sumber kriteria maka penyusun menggunakan konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku ilmiah.

4. Sumber Keempat

Jika tidak ada ketentuan, peraturan atau petunjuk pelaksanaan, dan juga tidak ada teori yang diacu, penyusun disarankan untuk menggunakan hasil penelitian. Dalam hal ini sebaiknya tidak langsung mengacu pada hasil penelitian yang baru saja diselesaikan seorang peneliti (apalagi peneliti pemula), tetapi disarankan sekurang-kurangnya hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan. Jika ada, yang sudah

disajikan kepada orang banyak, yaitu disimpan di perpustakaan umum.

5. Sumber Kelima

Apabila penyusun tidak menemukan acuan yang tertulis dan mantap, dapat minta bantuan pertimbangan kepada orang yang dipandang mempunyai kelebihan dalam bidang yang sedang dievaluasi sehingga terjadi langkah yang dikenal dengan expert judgment.

6. Sumber Keenam

Apabila sumber acuan tidak ada, sedangkan ahli yang dapat diandalkan sebagai orang yang lebih memahami masalah dibanding penyusun juga sukar dicari atau dihubungi maka penyusun dapat menentukan kriteria secara bersama dengan anggota tim atau beberapa orang yang mempunyai wawasan tentang program yang akan dievaluasi. Perbedaan cara ini dengan expert judgment adalah bahwa seorang expert tentunya memiliki keahlian yang menonjol, sedangkan kelompok yang diundang dalam diskusi ini tidak harus yang sangat mempunyai kemampuan lebih. Kriteria atau tolok ukur yang tersusun dari diskusi ini merupakan hasil kesepakatan kelompok.

7. Sumber Ketujuh

Dalam keadaan yang sangat terpaksa karena acuan tidak ada, ahli juga tidak ada, sedangkan untuk menyelenggarakan diskusi terlalu sulit maka jalan terakhir adalah melakukan pemikiran sendiri. Dalam keterpaksaan seperti ini penyusun kriteria atau tolok ukur hanya mengandalkan akal atau nalar penyusun sendiri sebagai dasar untuk menyusun kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi program. Jika ternyata sesudah digunakan dalam mengevaluasi masih menjumpai kesulitan, penyusun harus meninjau kembali dan wajib memperbaikinya berkali-kali sampai mencapai suatu rumusan yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

d. Cara menyusun kriteria

Sebelum membicarakan tentang bagaimana menyusun kriteria atau tolok ukur perlu terlebih dahulu dipahami bahwa wujud dari kriteria adalah tingkatan atas gradasi kondisi sesuatu yang dapat ditransfer menjadi nilai. Secara garis besar ada dua macam kriteria, yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif.

1. Kriteria Kuantitatif

Kriteria kuantitatif sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) kriteria tanpa pertimbangan, dan (2) kriteria dengan pertimbangan.

a) Kriteria Kuantitatif Tanpa Pertimbangan

Kriteria yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa dilakukan dengan membagi rentangan bilangan.

Contoh:

Kondisi maksimal yang diharapkan untuk prestasi belajar diperhitungkan 100%. Jika penyusun menggunakan lima kategori nilai maka antara 1% dengan 100% dibagi rata sehingga menghasilkan kategori sebagai berikut:

- Nilai 5 (Baik Sekali), jika mencapai 81-100%
- Nilai 4 (Baik), jika mencapai 61-80%
- Nilai 3 (Cukup), jika mencapai 41-60%
- Nilai 2 (Kurang), jika mencapai 21-40%
- Nilai 1 (Kurang Sekali), jika mencapai < 21%

Istilah untuk sebutan yang menunjukkan kualitas bukan hanya dari Baik Sekali sampai Kurang Sekali, tetapi bisa Tinggi Sekali, Tinggi, Cukup, Rendah, dan Rendah Sekali, atau mungkin Sering Sekali, Sering, sampai dengan Jarang Sekali. Selain itu, dapat juga menggunakan istilah-istilah lain yang menunjukkan kualitas suatu keadaan, sifat, atau kondisi, seperti Banyak Sekali, Sibuk Sekali, dan lain-lainnya. Untuk pertimbangan atau pendapat orang, penyusun dapat menggunakan kata Setuju, Sependapat, dan lain-lain.

b) Kriteria Kuantitatif dengan Pertimbangan

Ada kalanya beberapa hal kurang tepat jika kriteria kuantitatif dikategorikan dengan membagi begitu saja rentangan yang ada menjadi rentangan sama rata. Sebagai contoh adalah nilai di beberapa perguruan tinggi untuk menentukan nilai dengan huruf A, B, C, D, dan E. Bagaimana menentukan nilai untuk masing-masing huruf mengacu pada peraturan akademik berdasarkan besarnya persentase pencapaian tujuan belajar sebagai berikut:

- Nilai A: rentangan 80-100%
- Nilai B: rentangan 66-79%
- Nilai C: rentangan 56-65%
- Nilai D: rentangan 40-55%
- Nilai E: kurang dari 40%

Melihat pengkategorian nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa rentangan di dalam setiap kategori tidak sama, demikian juga jarak antara kategori yang satu dengan lainnya. Hal ini dibuat karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan sudut pandang dan pertimbangan evaluator.

2. Kriteria Kualitatif

Yang dimaksud dengan kriteria kualitatif adalah kriteria yang dibuat tidak menggunakan angka-angka. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria kualitatif adalah indikator dan yang dikenai kriteria adalah komponen. Seperti halnya kriteria kuantitatif, jenis kriteria kualitatif juga dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) kriteria kualitatif tanpa pertimbangan, dan (b) kriteria kualitatif dengan pertimbangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Kriteria Kualitatif tanpa Pertimbangan

Dalam menyusun kriteria kualitatif tanpa pertimbangan, penyusun kriteria tinggal menghitung banyaknya indikator dalam komponen, yang dapat memenuhi persyaratan. dari

penjelasan tentang hubungan antara indikator, komponen, dan program tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Komponen adalah unsur pembentuk kriteria program,
 - 2) Indikator adalah unsur pembentuk kriteria komponen.
- b) Kriteria Kualitatif dengan Pertimbangan

Dalam menyusun kriteria, terlebih dahulu tim evaluator perlu merundingkan jenis kriteria mana yang akan digunakan, yaitu memilih kriteria tanpa pertimbangan atau dengan pertimbangan. Jika yang dipilih adalah kriteria dengan pertimbangan maka tentukan indikator mana yang harus diprioritaskan atau dianggap lebih penting dari yang lain.

Kriteria kualitatif dengan pertimbangan disusun melalui dua cara, yaitu: (1) dengan mengurutkan indikator, dan (2) dengan menggunakan pembobotan.

1) Kriteria kualitatif dengan Pertimbangan Mengurutkan Indikator

Jika penyusun memilih kriteria kualitatif dengan pertimbangan mengurutkan indikator dengan urutan prioritas maka dihasilkan kriteria kualitatif dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Nilai 5, jika memenuhi semua indikator,
- Nilai 4, jika memenuhi (b), (c), dan (d), atau (a).
- Nilai 3, jika memenuhi salah satu dari (b) atau (c) saja, dan salah satu dari (d) atau (a).
- Nilai 2, jika memenuhi salah satu dari empat indikator.
- Nilai 1, jika tidak ada satu pun indikator yang memenuhi.

Penentuan nilai yang dikemukakan di atas hanya merupakan contoh. Kita perlu mempertimbangkan apa saja indikator yang diidentifikasi, mana yang ditentukan sebagai indikator penting, serta bagaimana gradasi nilai dibuat dalam menentukan kriteria. Yang penting adalah bahwa apa pun yang ditentukan harus didukung oleh argumentasi atau penalaran yang benar, yaitu alasan yang masuk akal.

Jika yang dikenai kriteria itu bukan indikator, tetapi subindikator (bagian dari indikator) maka yang digunakan untuk mempertimbangkan penentuan kriteria adalah subindikator atau rincian dari indikator. Dalam hal ini kriteria yang akan digunakan ditentukan atas dasar subindikator yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu tersebut.

Perlu diketahui oleh para evaluator bahwa mengadakan identifikasi indikator dan subindikator seperti yang dicontohkan memang bukan pekerjaan yang mudah. Untuk dapat lebih teliti mendapatkan indikator dari sebuah komponen dan mendapatkan subindikator dari masing-masing indikator, diperlukan latihan dan pembiasaan. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa ada kalanya sebuah indikator sudah tidak dapat dipecahkan lagi menjadi lebih kecil, yaitu subindikator. Dalam keadaan seperti itu, indikator hanya merupakan satu-satunya dasar pembuatan kriteria atau tolok ukur.

2) Kriteria kualitatif dengan Pertimbangan Pembobotan

Selain mempertimbangkan indikator sebagai unsur untuk menentukan tingkatan nilai dalam kriteria, ada juga cara lain yang dapat digunakan oleh evaluator dalam menentukan nilai, yaitu pembobotan.

Jika dalam menentukan kriteria dengan pertimbangan indikator, nilai dari tiap-tiap indikator tidak sama, kemudian letak, kedudukan, dan pemenuhan persyaratannya dibedakan dengan menentukan urutan, dalam pertimbangan pembobotan indikator-indikator yang ada diberi nilai dengan bobot berbeda. Penentuan peranan subindikator dalam mendukung nilai indikator harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat.

Kalau sudah ditentukan pembobotannya, kini para penilai tinggal memilih akan menggunakan skala berapa dalam menilai objek. Mungkin skala 1-3, 1-4, atau 1-5, atau bahkan seperti yang lazim digunakan di sekolah, yaitu skala 1-10? Terserah saja. Yang penting adalah proses pada waktu menentukan nilai akhir indikator.

Cara memperoleh nilai akhir indikator adalah:

- (a) Mengalikan nilai masing-masing subindikator dengan bobotnya;
 - (b) Membagi jumlah nilai subindikator dengan jumlah bobot.
- Adapun rumus nilai akhir indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai indikator} = \frac{\text{Jumlah bobot subindikator} \times \text{nilai subindikator}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Jika bobot subindikator disingkat BSI, nilai indikator disingkat NI, nilai subindikator disingkat NSI, dan jumlah bobot disingkat JB, maka rumus nilai akhir indikator dalam singkatan adalah sebagai berikut:

$$NI = \frac{BSI \times NSI}{JB}$$

Penggunaan kriteria dengan pertimbangan unsur dan pembobotan ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Ketika guru menentukan nilai akhir mata pelajaran, biasanya memberikan bobot nilai ujian lebih besar dibandingkan dengan nilai ulangan harian. Sebagai kelengkapan pertimbangan, nilai tugas juga diperhitungkan dalam menambah unsur penunjang, tetapi bobot yang diberikan lebih kecil dari ulangan dan ujian. Ada kalanya dosen juga memperhitungkan kehadiran sebagai salah satu unsur yang diperhitungkan. Alasannya, jika seorang mahasiswa hadir kuliah, meskipun minim, tentu memperoleh ilmu yang tersimpan di otaknya. Perolehan itu tentu lebih besar dibandingkan dengan nol besar yang diperoleh mahasiswa yang tidak hadir. Dengan masuknya unsur kehadiran dalam penentuan nilai akhir ini, hasil penilaian menjadi lebih cermat sehingga lebih baik.

Setelah kita memahami cara menentukan nilai indikator dengan dasar hasil penilaian subindikator, selanjutnya adalah menentukan nilai komponen dengan dasar nilai indikator, dan nilai program dengan dasar nilai komponen. Jika dalam menghitung nilai akhir indikator kita menggunakan rumus berdasarkan subindikator maka dalam menghitung nilai

komponen menggunakan indikator sebagai unsur. Adapun rumus nilai akhir komponen adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai komponen} = \frac{\text{Jumlah bobot indikator} \times \text{nilai indikator}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Jika nilai komponen disingkat NK, bobot indikator disingkat BI, nilai indikator disingkat NI, dan jumlah bobot disingkat JB, maka rumus dalam singkatan adalah sebagai berikut:

$$NK = \frac{(BI \times NI)}{JB}$$

Bertitik tolak pada pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tinggi rendahnya kualitas suatu program sangat tergantung dari tinggi rendahnya kualitas komponen.
- 2) Tinggi rendahnya kualitas komponen tergantung dari tinggi rendahnya kualitas indikator.

Tinggi rendahnya kualitas indikator tergantung dari tinggi rendahnya kualitas sub indikator.

E. KONSEP PROGRAM/KEBIJAKAN BINA LINGKUNGAN

a. Perencanaan Program Biling

Berhasil tidaknya program biling, berawal dari baik tidaknya perencanaan program biling tersebut mulai dari penerimaan siswa baru sekolah apakah menerapkan sistem penerimaan siswa baru sebagaimana standar yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kota Bandar Lampung atau bahkan keluar dari standar yang telah ditetapkan.

Dari perencanaan penerimaan siswa baru yang belum menyesuaikan dengan tujuan, prinsip dan azas dari penerimaan siswa baru itu sendiri, bagaimana proses perencanaannya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana.

b. Input Program Biling

Evaluasi program biling ini mengidentifikasi apa saja input yang akan membantu para pengambil keputusan dalam menilai rencana tindakan, rencana staf dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiveness (Wirawan, 2012: 93)⁵³. Input dalam evaluasi program biling ini meliputi siswa biling, SDM pelaksana, sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan biling, dan dana kegiatan biling.

c. Proses Program Biling

Proses penerimaan siswa baru selalu dilakukan secara manual pada masing-masing sub rayon, maka akan menyebabkan berbagai kesulitan dari beberapa pihak yang terkait. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai sistem penerimaan siswa baru seperti dengan ara tes, *online* atau yang dikenal dengan nama PSB *online*, jalur bakat dan prestasi, jalur lingkungan dan sebagainya.

Penerimaan siswa baru baik secara manual maupun *online* bukan semata melakukan penjarangan terhadap siswa untuk diterima di sekolah, akan tetapi lebih jauh dari dalam penerimaan siswa baru sekolah harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan hak dan kesempatan bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan siswa baru tentunya perlu didukung oleh regulasi-regulasi yang dapat menjadi pedoman dan sekaligus untuk mengawal pelaksanaan dari penerimaan siswa baru itu sendiri. Regulasi itu dapat berbentuk peraturan menteri, peraturan daerah ataupun peraturan atau pedoman sekolah.

⁵³ Wirawan, 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, Penerbit: Rajawali Pers: Jakarta.

d. *Output* Program Biling

Dalam memandang organisasi sebagai suatu sistem (Usman, Husaini: 2009), kualitas dan kuantitas siswa yang diterima merupakan output dari proses seleksi penerimaan siswa baru (PSB) (Nizarman (2015).

e. *Outcome* Program Biling

Sebagai suatu sistem (Usman, Husaini: 2009), maka outcome dari program penerimaan siswa baru ini adalah kualitas dan kuantitas lulusan dari sekolah yang bersangkutan.

F. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Paparan mengenai hasil penelitian yang relevan diambil/dikutip dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, baik dalam bentuk penelitian yang dihasilkan serta dalam bentuk disertasi maupun yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diambil dari jurnal baik pada tingkat nasional maupun internasional, tentunya jurnal yang telah terakreditasi. Hal-hal yang dikutip oleh peneliti sebagaimana tertuang pada table yang terkait dengan judul penelitian, objek yang dievaluasi, subjek yang diteliti dan temuan hasil penelitian secara sederhana. Hasil penelitian yang penulis anggap memiliki relevansi dengan penelitian ini tertuang pada table di bawah ini:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan	Temuan Penelitian
Muliati A.M (Disertasi); 2012	Evaluasi Pendidikan Sistem Ganda: Suatu Penelitian Evaluatif berdasarkan Stake's Countenance Model Mengenai Program Pendidikan Sistem Ganda pada sebuah SMK di Sulawesi Selatan	Evaluasi Program	Siswa Biling	Berdasarkan sub evaluasi masukan, terdapat 6 aspek dari 12 sub aspek yang dievaluasi diperoleh temuan: Pada aspek hasil (out-comes) berdasarkan hasil studi dokumen ujian nasional 2005/2006 terhadap tiga mata pelajaran, diperoleh data bahwa dari 49 siswa kelas III program keahlian Usaha Jasa Pariwisata yang ikut ujian nasional 48 lulus dan 1 siswa tidak.
Agus Taufik Mulyono (Disertasi); 2010	Model Monitoring dan Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Jalan Berbasis Pendekatan Sistemik	Evaluasi	Program Siswa Biling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) fak-tor dominan yang signi-fikan mem-pengaruhi pemberla-kuan stan-dar mutu secara sistemik, yaitu sdm, sosialisasi standar mutu, pen-capaian mutu, ke-kuatan struktural dan keman-tapan jalan.
Terry Irenewaty dan Aman (Penelitian); 2007	Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Muham-madiyah 4 Yogyakarta	Evaluasi	Program Siswa Biling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam pe-nyelengga-raan pend-i-dikan inklu-sif.
R. Andi Ahmad	Evaluasi Pembelajaran	Evaluasi	Program Siswa	Hasil penelitian menunjukkan: (1)

<p>Gunadi (Artikel); 2014</p>	<p>Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan dengan Model Context Input Process Product</p>	<p>Biling</p>	<p>pada evaluasi konteks, landasan yuridis dan studi kela-yakan, su-dah memenuhi standar yang dite-tapkan UU; (2) pada e-valuasi ma-sukan, pe-laksanaan pembelajar-an sudah sesuai per-aturan pemerintah; (3) pada e-valuasi pro-ses, kompe-tensi guru baik, proses pembelajaran baik; (4) pada eva-luasi pro-dukt, nilai hasil belajar baik,</p>
<p>Pitnawati dan Damrah (Artikel); 2019</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Program Latihan Senam Di Klub Senam Semen Padang</p>	<p>Siswa Biling</p>	<p>Hasil evalua-si program latihan de-ngan meng-gunakan mo-del CIPP adalah perlu perbai-kan di beberapa as-pek, yaitu peningkatan perhatian pe-ngelola (FK-SSP) terha-dap kebij-a-kan yang telah dikelu-arkan, per-baikn ter-hadap criteria rekrutmen pelatih dan atlet, perbai-kan dan pengadaa sarana pra-sarana yang bertaraf na-sional/internasional, meng-gunakan me-tode latihan yang berva-riasi, pening-kan asupan gizi atlet, pe-ningkatan system pe-ngawasan yang terpadu serta pening-kan kese-jahteraan pe-latih dan atlet.</p>

G. KERANGKA PIKIR

Suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai evaluasi efektifitas pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri se kota Bandar Lampung mulai dari perencanaan, input, proses, output dan outcome dari program bina lingkungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di Ohio State University. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: Context evaluation: evaluasi terhadap konteks; Input evaluation : evaluasi terhadap masukan; Process evaluation : evaluasi terhadap proses; dan Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.

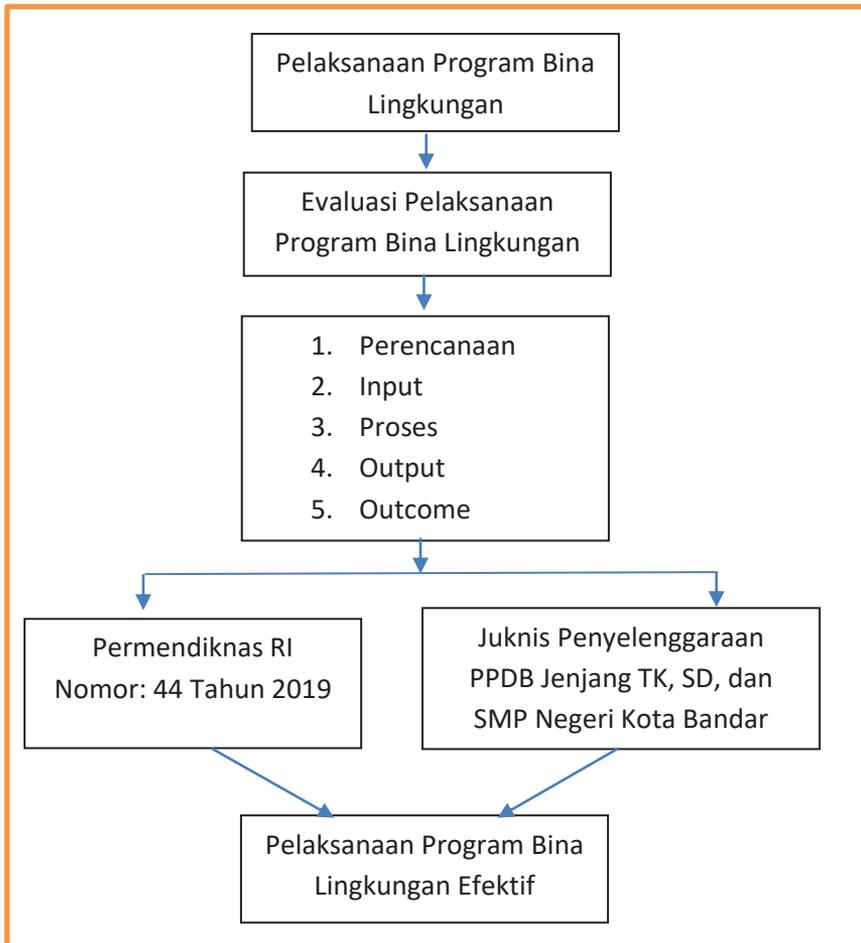
Konteks evaluasi ini menurut Tayibnapis⁵⁴ membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Input evaluation menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya; Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki. Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?

Efektif tidaknya program bina lingkungan di SMP Negeri se kota Bandar Lampung dilihat dari apakah keputusan pada setiap komponen perencanaan, input, proses, output dan outcome dari program bina lingkungan merupakan keputusan yang tepat? Pelaksanaan program bina lingkungan dikatakan

⁵⁴ Tayibnapis, 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*: Penerbit: PT. Rineka Cipta, h. 14.

efektif, manakala keputusan terhadap perencanaan, input, proses, output dan outcome dari biling sudah tepat sesuai dengan tujuan progam biling tersebut. Hal tersebut digambarkan dalam skema pemikiran yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan



Pada kerangka pikir di atas dijadikan fokus masalah yang akan diteliti secara mendalam.

METODE PEMBAHASAN

A. PENDEKATAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pengkajian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistik) tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁵⁵ Penulis berpedoman pada pendapat Moleong menggunakan pendekatan kualitatif dan hal ini dipandang cocok, karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan persoalan penelitian ini yaitu tentang kebijakan publik mengenai pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3

nilai yang dihadapi.⁵⁶ Pendapat tersebut sesuai dengan seting pengkajian yang akan penulis hadapi.

Penulis memilih pendekatan kualitatif karena memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) pengumpulan data dilakukan dalam latar yang alamiah, (2) peneliti itu sendiri yang merupakan instrument utama, (3) sarat dengan deskripsi, (4) mementingkan makna, konteks dan perspektif emik, (5) proses penelitian berbentuk siklus, (6) pengumpulan dan analisis data berlangsung secara simultan, (7) pengambilan sampel secara purposive, (8) analisis induktif, (9) *grounded theory*, (10) mementingkan kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian, (11) desain penelitian lentur dan terbuka, (12) keterikatan antara temuan dan fokus, (13) observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data, (14) bentuk laporan dengan model studi kasus, (15) penafsiran bersifat idiographik, (16) aplikasi tentative, (17) ikatan kontek, terfokus, dan (18) kriteria keterpercayaan yang terdiri kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁵⁷ Begitu juga beberapa karakteristik di atas terdapat pada seting penelitian di lapangan sesuai dengan observasi peneliti.

Penulis dapat memilah-milah sesuai fokus pengkajian yang telah disusun, penulis juga dapat mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan baik dengan subjek (responden) serta penulis berusaha memahami keadaan subjek dan senantiasa berhati-hati dalam penggalian informasi subjek sehingga subjek tidak merasa terbebani. Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suryasubrata, penelitian lapangan bertujuan “mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok,

⁵⁶ Lexy J. Moleong, h. 9 - 10.

⁵⁷ Lihat Lincoln & Guba, *Naturalistic Inquiry*, h. 39-43 dan Dafid Wiliams dalam Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, h. 18-20.

lembaga atau masyarakat”.⁵⁸ Adapun yang menjadi lapangan penelitian adalah SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam pengkajian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus sendiri dapat diartikan sebagai an intensive, holistic descriptions and analysis of a single instance, phenomenon, or social unit.⁵⁹ Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya studi kasus merupakan suatu strategi penelitian yang mengkaji secara rinci suatu objek atau peristiwa tertentu. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia, dan lain sebagainya. Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, catatan harian atau biografi orang yang diamati, laporan atau keterangan dari orang banyak tentang hal yang diamati.⁶⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian mendalam tentang evaluasi pelaksanaan program bina lingkungan di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

Penulis berusaha memahami dan menggambarkan perilaku manusia berdasarkan penafsiran dan pendirian mengenai aktivitasnya. Pendekatan kualitatif ini menunjuk pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan atau tingkah laku dan mengarah pada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistic.⁶¹ Menurut Nasution, penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain sumber data berupa situasi yang wajar atau natural setting. Data dikumpulkan berdasarkan observasi situasi wajar

⁵⁸ Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

⁵⁹ Yesim Ozbarlas, *Perspektives an Multicultural Education: Case Studies of A German and An American Female Minority Teacher*, dalam Siti Farida, *Digilib.uin-malang.ac.id* diakses 20 Mei 2017

⁶⁰ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 27-28

⁶¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Affandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 30

apa adanya tanpa dipengaruhi. Peneliti berkedudukan sebagai instrument. Laporan dan uraian penelitian berupa penguasaan data deskriptif, proses maupun produk dalam arti memperhatikan bagaimana perkembangan sesuatu yang terjadi.⁶² Pokok kajian dalam penelitian kualitatif adalah sebuah organisasi atau individu yang tidak akan direduksi kepada variable yang telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Organisasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah organisasi lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Penelitian kualitatif ini menunjuk pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan atau tingkah laku dan mengarah pada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistic yang ada di lembaga SMP Negeri Kota Bandar Lampung tersebut.

B. DATA DAN SUMBER DATA

1. Data Penelitian

Data penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi. Adapun data penelitian kualitatif terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.⁶³ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi pelaksanaan program bina lingkungan.

⁶² S. Nasution, *Metode Naturalisme Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), h. 9-12

⁶³ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.56

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan-catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian.⁶⁴

Termasuk data dalam pengkajian ini adalah gejala-gejala sebagaimana adanya berupa perkataan, ucapan, pendapat dan perilaku kepala sekolah, para guru dan siswa SMP Negeri Kota Bandar Lampung dalam program bina lingkungan. Berbagai gejala peristiwa yang terjadi tersebut dibiarkan secara natural, dan peneliti melakukan pengamatan bebas dalam koridor independen ilmiah. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa jenis data pada penelitian kualitatif ini pada umumnya berbentuk kata-kata subyek, baik tulisan maupun lisan. Karena kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, yang sering meyakinkan pembacanya.

Selanjutnya proses penjarangan data dari subyek dan informan dalam penelitian ini digunakan teknik snowball sampling, setelah data diperoleh dari subyek dikembangkan dan dikonfirmasi kepada informan lain, dan setiap selesai wawancara dengan subyek atau informan selalu minta ditunjukkan kepada siapa lagi peneliti dapat melanjutkan penggalian data, kegiatan tersebut terus dilakukan peneliti seperti halnya bola salju yang menggelinding yang semakin lama semakin membesar. Proses ini baru berhenti setelah data dianggap jenuh, yaitu informasi yang diperoleh diantara informasi

⁶⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 62

satu dengan yang lainnya sama dan tidak ada data yang dianggap baru.⁶⁵

Data penelitian yang akan digali yaitu data tentang pelaksanaan bina lingkungan di SMP Negeri Kota Bandar Lampung yang meliputi: identifikasi perencanaan program bina lingkungan, identifikasi input program bina lingkungan, identifikasi proses program bina lingkungan, identifikasi output program bina lingkungan, dan identifikasi outcome program bina lingkungan. Disamping itu akan dikaji pula tentang factor yang mempengaruhi pelaksanaan program bina lingkungan. Data penunjang yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi: Sejarah berdirinya lembaga pendidikan, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah SMP Negeri di Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data Penelitian

Menurut Silalahi, sumber data penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dan pelaku utamanya yang disebut sebagai *first-hand information*. Data-data yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang actual ketika suatu peristiwa itu terjadi. Sumber data primer itu sendiri bisa berasal dari individu, kelompok fokus ataupun satu kelompok responden.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dinas pendidikan kota Bandar Lampung, serta kepala sekolah atau guru dari beberapa SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

⁶⁵ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 182

⁶⁶ Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Unpar Press, 2006), h. 266

Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder dimana data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁷

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data Suharsimi Arikunto mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan huruf (p) dari Bahasa Inggris, yaitu: p = person, sumber data berupa orang, p = place, sumber data berupa tempat, p = paper, sumber data berupa symbol.⁶⁸

1. Sumber data berupa orang, wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Guru dan Siswa SMP Negeri yang ada di Kota Bandar Lampung, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, input, proses, output dan outcome dari program bina lingkungan.
2. Sumber data berupa tempat, dalam penelitian ini, peneliti secara langsung berada di lembaga-lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung untuk melihat peristiwa ataupun mengamati data, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program bina lingkungan di SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, h, 132

Jadi posisi peneliti sebagai observer aktif ataupun pasif.

3. Sumber data berupa symbol, dari dokumentasi akan diperoleh data antara lain struktur organisasi di SMP Negeri Kota Bandar Lampung, data lembaga pendidikan SMP Negeri se-Kota Bandar Lampung, data kepala sekolah, data guru, data siswa, data program bina lingkungan dan pelaksanaannya.

Kriteria subjek dan informan kunci sebagai sumber data ditentukan sebagai berikut: (1) subjek yang terlibat menangani kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, (2) subjek cukup lama dan intensif menyatu atau menangani kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, (3) subjek yang masih aktif terlibat dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian, (4) subjek yang mempunyai waktu untuk diwawancarai peneliti, (5) subjek yang memberikan informasi yang sebenarnya, dan (6) subjek yang tidak memihak, menilai dan subjektif terhadap aktifitas yang menjadi sasaran penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah atau guru dari beberapa SMP Negeri di Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari:

Tabel 3.2. Daftar Informan Penelitian:

No	Nama	Jabatan
1	Sri Chairattini Ekayanti Alam	Kepala Sekolah SMP Negeri 19
2	Yuliati	Kepala Sekolah SMP Negeri 21
3	Rita Ningsih	Kepala Sekolah SMP Negeri 22
4	Irwan Qalbi	Kepala Sekolah SMP Negeri 23
5	Yamin, SPd.	Waka. Kesiswaan SMP N. 28

Sumber: Data diolah, tahun 2020

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian dalam kajian ini paadalah peneliti sendiri, sebagaimana penjelasan Djam'an Satori dan Komariah bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutkan sebagai *key instrument*.⁶⁹ Berdasarkan penjelasan Djam'an Satori dan Komariah kehadiran peneliti adalah satu unsur paling penting dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pelaksana pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor bagi penelitiannya.

Menurut Sugiono bahwa penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya.⁷⁰ Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷¹

Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian, (2) peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, (3) tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak

⁶⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 61

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305

⁷¹ Sugiono, h. 306

ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia, (4) suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita, (5) peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika, (6) hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau perlakuan.⁷²

Pada kajian ini penulis sebagai human instrument melakukan pengumpulan data sendiri, dengan bantuan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara, kamera, perekam suara, catatan lapangan dan dokumen yang ada di lembaga pendidikan SMP Negeri di Kota Bandar Lampung yang dikembangkan dari fokus dan subfokus masalah. Sebagaimana telah dijelaskan sebagai fokus masalah dalam penelitian ini adalah program bina lingkungan yang dijabarkan ke dalam subfokus yaitu perencanaan program bina lingkungan, masukan program bina lingkungan, proses pelaksanaan program bina lingkungan, luaran program bina lingkungan, dan outcome program bina lingkungan. Maka pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti contoh di bawah ini, contoh pedoman wawancara.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 308

Tabel 3.3. Pedoman Wawancara Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

No	Subfokus	Petikan Wawancara
1	Perencanaan Program Bina Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana saudara merumuskan tujuan program bina lingkungan? 2. Bagaimana saudara memenuhi kebutuhan sumber daya untuk terlaksananya program bina lingkungan? 3. Bagaimana saudara melaksanakan rencana program bina lingkungan? 4. Bagaimana saudara mengatasi masalah kekurangan sumber daya
2	Masukan Program Bina Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan? 2. Bagaimana melibatkan para guru dalam program bina lingkungan? 3. Bagaimana cara menyediakan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan? 4. Bagaimana saudara mengelola sumber biaya dalam pelaksanaan program bina lingkungan? 5. Bagaimana mengondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan?
3	Proses Pelaksanaan Program Bina Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan? 2. Bagaimana penyelenggaraan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan? 3. Bagaimana pelaksanaan

		pembelajaran terhadap siswa dari jalur program bina lingkungan?
4	Luaran Program Bina Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas dari jalur program bina lingkungan? 2. Bagaimana strategi peningkatan mutu lulusan dari jalur program bina lingkungan? 3. Bagaimana saudara melakukan pembinaan non akademik bagi siswa dari jalur program bina lingkungan?
5	Outcome Program Bina Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana saudara mengetahui keberlanjutan lulusan hasil program bina lingkungan yang dapat mengikuti studi lanjut dalam dan luar negeri? 2. Bagaimana aktivitas lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan, jika tidak melanjutkan studinya? 3. Bagaimana saudara mengetahui aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industri masing-masing?

Selain metode wawancara digunakan pula metode observasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang berupa rencana pelaksanaan program bina lingkungan, proses penerimaan siswa bina lingkungan, proses pembagian tugas, interaksi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, kegiatan-kegiatan pembelajaran, administrasi, ekstra kurikuler, kondisi keuangan, sarana prasarana, pengeluaran kebijakan. Lembar observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data contohnya adalah:

Tabel 3.4. Pedoman Observasi

No	Aspek yang Diobservasi	Keterangan
1	Apakah ada dokumen tentang perencanaan program bina lingkungan?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama
2	Apakah ada dokumen proses penerimaan siswa bina lingkungan, dan pembagian tugas?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama
3	Apakah ada dokumen proses interaksi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam program bina lingkungan?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama
4	Apakah ada dokumen kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk program bina lingkungan?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama
5	Apakah ada dokumen administrasi, ekstra kurikuler, kondisi keuangan, sarana prasarana terkait program bina lingkungan?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama
6	Apakah ada dokumen kebijakan yang dikeluarkan terkait program bina lingkungan?	- Ada - Sempurna - Dirumuskan bersama

Selain metode wawancara dan metode observasi digunakan pula metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang berupa keadaan guru, peserta didik, sarana pendidikan, media pembelajaran dan lain-lain. Lembar dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data contohnya adalah:

Tabel 3.5. Dokumen yang Dibutuhkan

No	Dokumen yang diperlukan	Keadaan	
		Tersedia	Tidak Tersedia
1	Keadaan (data) guru		
2	Data peserta didik		
3	Sarana pendidikan		
4	Struktur Organisasi		
5	Denah Lokasi		
6	Buku Notulen Rapat		
7	Profil Sekolah		

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁷³ Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi sebagaimana pemaparan Emzir bahwa sumber data kualitatif antara lain observasi, wawancara, dokumentasi pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kadang-kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual.⁷⁴ Dalam penelitian ini kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan secara bersama-sama dan pada waktu yang sama.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.⁷⁵ Dalam kajian ini dilaksanakan dengan teknik (participant observation), yaitu dilakukan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224

⁷⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 37

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 91

dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.⁷⁶ Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam kajian ini, penulis secara langsung berada di lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung untuk melihat peristiwa ataupun mengamati data, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan program bina lingkungan di SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Jadi posisi peneliti sebagai observer aktif ataupun pasif.

2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yang melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁷⁷ Wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membawa pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, staf pengajar/ guru, tenaga kependidikan dan siswa dari jalur program bina lingkungan SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diperlukan dokumentasi. Dokumentasi yang diperlukan antara lain dokumentasi resmi lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung yang berupa data kepala sekolah, data guru, arsip-arsip lembaga

⁷⁶ Sutrisno Hadi,, h. 69

⁷⁷ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50

pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung yang memuat visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan SMP Negeri, serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung berkenaan dengan pelaksanaan program bina lingkungan.

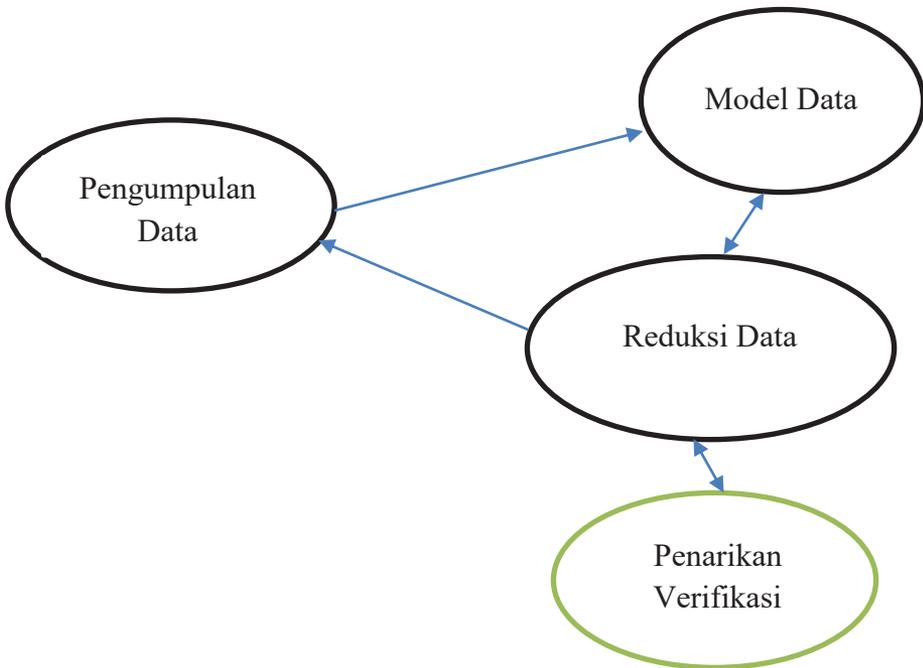
Dari dokumen tersebut diharapkan diperoleh data antara lain struktur organisasi SMP Negeri Kota Bandar Lampung, kejelasan tujuan lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung yang dilihat dari visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung, data kepala sekolah, data guru dan tenaga kependidikan.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisa data dalam kajian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah tersebut merujuk pada pendapat Miles dan Huberman yang menyebutkan bahwa dalam menganalisis data dilakukan melalui tiga cara yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing and ferivication*.⁷⁸

Tiga jenis aktivitas analisa data dan pengumpulan data tersebut membentuk suatu siklus proses interaktif. Peneliti secara mantap bergerak dalam model ini selama pengumpulan data, model dan penyimpulan sebagai mana digambarkan dalam gambar 3.1.

⁷⁸ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publication Inc, 1994), h.11



Gambar 3.1

Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman⁷⁹

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan untuk memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data yang diperoleh dari catatan lapangan, sebagaimana penjelasan Emzir bahwa reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.⁸⁰

Dalam kajian ini dilakukan reduksi data yang telah didapatkan di lapangan melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Catatan lapangan yang berupa hasil wawancara disusun dan dirapihkan kembali, dilakukan

⁷⁹ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, , h. 12

⁸⁰ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 129

kategorisasi dan pengorganisasian data yang selanjutnya akan dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Koding dalam kajian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian tanda cara pengumpulan data dengan “W” untuk wawancara, dan “O” untuk observasi, dan “D” untuk dokumentasi.
- b. Pemberian kode data secara kronologis proses mendapatkan data dari subjek dengan mencantumkan angka dibelakang kode pengumpulan data. Misalnya W.01 berarti wawancara dengan subjek nomor 01.
- c. Pemberian tanda jenis data yang diperoleh berdasarkan subfokus penelitian dan indikatornya. Tanda ini ditulis dengan angka romawi dan diikuti dengan huruf sesuai dengan urutan indicator subfokus penelitian tersebut, subfokus penelitian perencanaan program bina lingkungan diberi kode I, masukan program bina lingkungan diberi kode II, proses program bina lingkungan diberi kode III, output program bina lingkungan diberi kode IV, dan outcome program bina lingkungan diberi kode V. indikator subfokus penelitian terdiri dari: (a) perencanaan program bina lingkungan, (b) masukan program bina lingkungan, (c) proses program bina lingkungan, (d) output program bina lingkungan, dan (e) outcome program bina lingkungan,
- d. Pemberian tanda dengan hari, tanggal, bulan dan tahun seperti dalam petikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemberian tanda ini diletakkan di akhir koding, misalnya W-01/IV-a jum’at, 11 April 2020, berarti data diperoleh melalui wawancara terhadap informan nomor 1 tentang perencanaan program bina lingkungan pada indicator perencanaan program bina lingkungan, dan wawancara tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020.

Penentuan kode informan yang ditentukan berdasarkan nomor urut informan subjek wawancara ditentukan sebagai mana tercantum dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Penentuan Kode Informan Wawancara

No.	Kode	Informan
1	W-01	Kepala Sekolah
2	W-02	Wk. Kepala Sekolah

Sedangkan kode jenis data yang ditentukan berdasarkan subfokus penelitian dan indikator masing-masing subfokus tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kode Jenis Data Wawancara⁸¹

Fokus Penelitian	Sub Fokus Penelitian	Indikator
Program Bina Lingkungan	I. Perencanaan Program Bina Lingkungan	Dirumuskan bersama oleh stakeholder
		Tersedia sumber daya untuk kebutuhan program bina lingkungan
		Dilaksanakan secara bersama-sama
		Kekurangan sumber daya dapat diatasi bersama stakeholder
	II. Masukan Program Bina Lingkungan	Terdapat kriteria siswa yang masuk melalui jalur bina lingkungan
		Melibatkan para guru
		Tersedianya dana yang cukup

⁸¹ Anderson, Management Skills, Function and Organizational Performance, (Win.C Brown Pub. 1984), h.295

		Pengelolaan sumber dana yang efisien
		Kondisi lingkungan belajar mengajar yang kondusif
	III. Proses Pelaksanaan Program Bina Lingkungan	Proses penerimaan siswa baru dari jalur bina lingkungan
		Proses seleksi siswa baru dari jalur bina lingkungan
		Proses belajar mengajar bagi siswa dari jalur program bina lingkungan
	IV. Luaran Program Bina Lingkungan	Jumlah lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan
		Prestasi akademik lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan
		Prestasi non akademik siswa dari jalur program bina lingkungan
	V. Outcome Program Bina Lingkungan	Lulusan dari jalur program bina lingkungan yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
		Lulusan dari jalur program bina lingkungan yang bekerja.
		Lulusan dari jalur program bina lingkungan yang tidak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi & menganggur.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi dan dilakukan koding, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sugiyono menjelaskan dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.⁸²

Dalam kajian ini data akan disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan temuan-temuan lapangan yang telah dikelompokkan dan dikode dalam kegiatan reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data direduksi dan disajikan, maka langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸³ Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan temuan-temuan berikutnya. Setelah dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan keabsahan data.

Peneliti juga menggunakan analisis data model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Spradley mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu: analisis domain dan analisis Taksonomi, penjelasannya sebagai berikut:

a. Analisis Domain

Analisis Domain dalam penjelasan Sugiyono dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.⁸⁴ Data diperoleh dari grand tour dan minitour questions.

⁸² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, h. 249

⁸³ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, h. 11

⁸⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 256

Hasilnya adalah gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

Pada permulaan pengkajian, penulis mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum dari pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri Kota Bandar Lampung tahun 2020. Semua kemungkinan data yang bisa digunakan dalam penelitian dikumpulkan satu per satu. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan dipisah-pisahkan berdasarkan kebutuhan peneliti dan dilakukan pengamatan terhadap data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan awal. Setelah didapatkan gambaran secara umum, peneliti mulai menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang bersifat umum, guna mendapatkan konfirmasi dari kesimpulan awal. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mencoba melewati beberapa prosedur untuk mendapatkan izin dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang selanjutnya direkomendasikan kepada kepala sekolah SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Menurut yang peneliti ketahui, rekomendasi dari kepala dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung bisa digunakan untuk kemudahan memasuki lembaga-lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung.

b. Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi dalam penjelasan Sugiyono adalah kelanjutan dari Analisis Domain. Domain-domain yang dipilih oleh peneliti, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan

dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.⁸⁵ Dengan demikian domain-domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam.

Di sini, penulis mulai melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun berdasarkan sub focus penelitian. Pengamatan lebih terfokus kepada masing-masing kategori, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari data masing-masing data yang telah terkumpul. Apabila data yang terkumpul dianggap kurang, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali dengan kriteria data yang lebih spesifik.

Penulis melakukannya dengan mereka-reka data dengan rasio-rasio yang digunakan dan hal-hal lain. Setelah ditemukan gambaran yang jelas, atau pola-pola tertentu dari data, selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu mengkonfirmasi temuan peneliti dalam analisis taksonomi.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

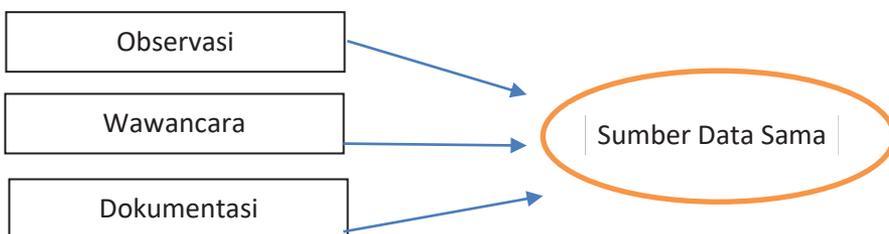
Uji kredibilitas (*Credibility*) dilakukan untuk memeriksa kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono uji kredibilitas antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam

⁸⁵ Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 261

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.⁸⁶

Penulis akan meningkatkan ketekunan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.⁸⁷ Selanjutnya penulis juga akan melakukan triangulasi dalam rangka memeriksa keabsahan data melalui uji kredibilitas.

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda tetapi sumber datanya sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Hal ini dapat digambarkan seperti Gambar 3.2.



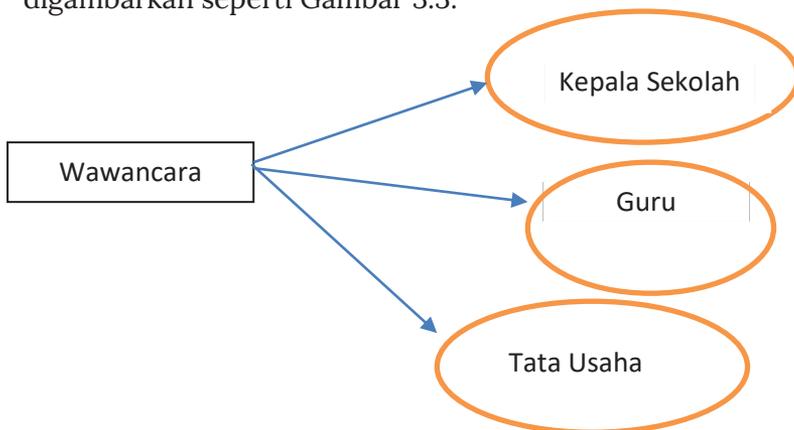
Gambar 3.2. Triangulasi teknik

Sedangkan triangulasi sumber adalah upaya mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama pula. Untuk memperoleh dan memperkuat data tentang identifikasi perencanaan program bina lingkungan pada lembaga pendidikan SMP Negeri Kota Bandar Lampung, masukan program bina lingkungan, proses pelaksanaan program bina lingkungan, output program bina lingkungan dan outcome program bina lingkungan. Selanjutnya dilakukan triangulasi sumber dengan melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah, guru dan staf tata usaha yang belum

⁸⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 368

⁸⁷ Sugiyono,, h. 369

diwawancarai pada kegiatan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan seperti Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Triangulasi Sumber

Setelah dilakukan uji kredibilitas data, sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara dibandingkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi. Namun, jika data yang diperoleh belum kredibel, peneliti juga akan melakukan perpanjangan pengamatan dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Perpanjangan pengamatan diakhiri apabila data yang diperoleh pada pengamatan pertama dan pengamatan perpanjangan tidak berubah.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut.⁸⁸

⁸⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, h. 276

Pengujian transferabilitas dalam pengkajian ini dilakukan dengan penulis berupaya membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, bermakna, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil pengkajian, dan dapat memutuskan apakah hasil pengkajian ini dapat digunakan di tempat lain atau tidak.

3. Defendabilitas (*defendability*)

Dalam penelitian kualitatif uji defendabilitas (*dependability*) dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁸⁹ Dalam penelitian ini uji dependabilitas dapat dilakukan oleh auditor dan validator yang independen atau oleh promotor dan co-promotor untuk mengaudit atau merevisi keseluruhan proses yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian.

Keseluruhan proses yang diaudit mulai dari penulis menentukan focus peneltian, menyusun pedoman wawancara dan lembar observasi, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, uji keabsahan data, sampai merumuskan kesimpulan. Hasil dari proses tersebut penulis akan menunjukkan jejak aktivitas lapangan kepada promotor dan co-promotor.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif konfirmabilitas dilakukan untuk menguji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil peneltian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, uji konfirmabilitas dalam pengkajian ini akan dilakukan bersamaan dengan uji dependabilitas, yakni dengan cara mengkonfirmasi/

⁸⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, h. 277

⁹⁰ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. h. 377

memastikan kepastian data tersebut kredibel, melakukan pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama, di lokasi penelitian yang sama sebagai bentuk konfirmasi.

Data yang dapat diuji konfirmabilitasnya adalah tentang perencanaan program bina lingkungan, masukan program bina lingkungan, proses pelaksanaan program bina lingkungan, luaran program bina lingkungan, outcome program bina lingkungan pada SMP Negeri Kota Bandar Lampung. Data yang berupa keterangan atau informasi dari informan yang dijadikan sumber data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga memiliki makna yang jelas dan bahkan akan menjadi sebuah teori program bina lingkungan di suatu organisasi.

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA UMUM

1. Gambaran Umum SMP Negeri SeKota Bandar Lampung

Keadaan umum SMP Negeri se Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan ibu Desmawati, S.Sos., M.M. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diketahui bahwa SMP Negeri yang tertua di Bandar Lampung adalah SMP Negeri 1 yang berdiri pada tahun 1951. Untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar, pada tahun 2020 pemda kota Bandar Lampung mendirikan lagi 4 (empat) buah SMP Negeri baru yaitu SMP Negeri 42, 43, 44 dan SMP Negeri 45 yang beralamat di Jalan Padat Karya Kecamatan Rajabasa, dengan SK pendirian tertanggal 23 April 2020, sehingga sampai dengan saat ini di kota Bandar Lampung ada sebanyak 45 SMP Negeri.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah: “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi

Kerakyatan.” Sedangkan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah: 1) Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat; 2) Mengembangkan masyarakat agamis berbudaya dan mengembangkan budaya daerah. Adapun tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat; 2) Meningkatkan kelestarian seni dan budaya daerah.

3. Keadaan Guru SMP Negeri se Kota Bandar Lampung

Keadaan guru SMP Negeri se Kota Bandar Lampung, berdasarkan data hasil survey dan wawancara dengan ibu Desmawati, S.Sos.,M.M. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diketahui bahwa terdapat kebutuhan guru sebanyak 2.101 orang, sementara jumlah guru yang tersedia sebanyak 1.797 orang yang terdiri dari guru PNS sebanyak 1.370 orang dan BPNS sebanyak 427 orang, sehingga terjadi kekurangan guru PNS sebanyak 732 orang. Dimana rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keadaan Guru SMP se Kota Bandar Lampung

Mapel	Jumlah Rombel	Kebutuhan	Jumlah Guru	Jumlah PNS	Jumlah BPNS	Aggregat
Bhs. Indo	1.018	261	246	207	39	-54
Bhs. Inggris	1.018	175	193	178	15	3
Bhs. Lampung	940	80	62	45	17	-35
BK	1.018	220	140	108	32	-112
IPA	1.018	213	221	196	25	-17
IPS	1.018	175	187	175	12	0
Kepsek	1.018	41	34	34	0	-7
Ketrampilan/Prakarya	1.018	89	83	28	55	-61
Mapel Tdk ada di kurikulum	105	0	4	1	3	0
Matematika	1.018	213	208	170	38	-43
Mulok	174	15	9	3	6	-12
PJOK	1.018	133	108	56	52	-77
PPKn	1.018	133	123	81	42	-52
Seni Budaya	1.018	133	115	62	53	-71
TIK/Informatika	1.018	220	64	26	38	-194
Jumlah	13.435	2.101	1.797	1.370	427	-732

Sumber: Data diolah dari hasil survey di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, tanggal 25 Agustus 2020.

4. Keadaan Siswa SMP Negeri se Kota Bandar Lampung

Dari 41 SMP Negeri se Kota Bandar Lampung, jumlah siswa ada sebanyak 30.864 orang yang terdiri dari: kelas VII sebanyak 11.019 orang, kelas VIII sebanyak 10.220 orang dan kelas IX sebanyak 9.625 orang yang berarti setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah siswa SMP Negeri se kota Bandar Lampung sebesar 7 %.

5. Keadaan Sarana Prasarana

Pada umumnya berdasarkan hasil survey di seluruh SMP Negeri se kota Bandar Lampung, bahwa keadaan sarana prasarana telah tercukupi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada permendiknas nomor: 24 tahun 2007 bahwa satu SMP minimal memiliki 3 rombongan belajar dan maksimal 24 rombel, serta 1 kecamatan dilayani minimal oleh 1 SMP Negeri, pada kenyataannya di Bandar Lampung sebagian besar SMP Negeri memiliki lebih dari 24 rombongan belajar, serta masih ada di satu kecamatan yang padat penduduknya yaitu lebih dari 16.000 jiwa hanya dilayani oleh 1 SMP Negeri, yaitu kecamatan Tanjungkarang Timur dan kecamatan Bumi Waras (Tabel 1.5). Data sarana dan prasarana secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

6. Kebijakan Program Bina Lingkungan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). PPDB ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Nomor: 421/IV.21/2020, tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021.

Kebijaksanaan program bina lingkungan ini, sejak digulirkannya pada tahun 2012 hingga tahun pelajaran 2020/2021 sepenuhnya diselenggarakan oleh setiap satuan

pendidikan dalam hal ini SMP Negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dimana kepanitiaannya terdiri dari panitia tingkat kota Bandar Lampung selaku coordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana. Penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2020/2021 melalui 4 (empat) jalur, yaitu: 1) jalur Zonasi; 2) afirmasi/bina lingkungan; 3) jalur prestasi dan 4) jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Jalur afirmasi/ bina lingkungan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur afirmasi ini mendapat kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Adapun jadwal pendaftaran, seleksi berkas, pengumuman dan pendaftaran ulang untuk jalur bina lingkungan, prestasi dan GTK lebih awal yaitu bulan Juni s.d. Juli 2020, sedangkan jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali proses pendaftarannya dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

Untuk penentuan diterima atau tidaknya siswa melalui jalur afirmasi/bina lingkungan ini disebutkan pada point c (komponen penilaian) adalah: 1) jarak antar tempat tinggal siswa ke sekolah, merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik berdasarkan jarak tempuh kesekolah yang menjadi pilihannya, serta usia peserta didik. Adapun nilai akhir jalur afirmasi/ bina lingkungan merupakan akumulasi dari komponen penilaian: (1) memenuhi kriteria tidak mampu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan; (2) berdasarkan usia peserta didik; dan (3) berdasarkan kuota yang tersedia di sekolah.

7. Profil Beberapa SMP Negeri di Bandar Lampung

7.1. Profil SMP Negeri 19 Bandar Lampung

A. Visi dan Misi Sekolah

1. Visi

“Berprestasi, berkarakter dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.”

2. Misi

"Disiplin kerja yang tinggi dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah, kerjasama yang harmonis , dan pelayanan prima di segala bidang"

Penjabaran misi di atas meliputi:

- 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- 3) Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
- 4) Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 5) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga terbangun peserta didik yang kompeten dan berkarakter.
- 6) Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

B. DATA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Tabel 4.2. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 19 Bandar Lampung

PENDIDIKAN	GURU	GURU TIDAK TETAP	TU. TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
S2	1	1	-	-
S1	55	11	3	12
D3	-	1	-	1
D2	1	-	-	-
D1	-	-	-	-
SLTA	-	1	1	1
SLTP	-	3	-	3
JUMLAH	57	17	4	17

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

C. Data Siswa

Tabel 4.3. Data jumlah siswa 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Ajaran	Jml Calon Siswa	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jml Kls. I+II+III	
		Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl
2015/2016	1.133	357	12	364	12	412	12	1.133	36
2016/2017	1.105	750	12	368	12	365	12	1.105	36
2017/2018	1.026	755	10	365	11	361	10	1.026	31
2018/2019	982	308	10	312	10	362	11	982	31
2019/2020	953	344	10	310	10	299	11	953	31
2020/2021	970	314	10	343	11	313	10	970	31

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

7.2. Profil SMP Negeri 21

A. Visi dan Misi Sekolah

1. Visi Sekolah

“ Taqwa, cerdas dan berkarakter ”

2. Misi Sekolah

MISI TAQWA :

1. Melaksanakan pembiasaan pengamalan ajaran agama di sekolah secara terpadu
2. Melengkapi fasilitas dan sarana ibadah secara bertahap
3. Memfasilitasi dan membimbing siswa dalam belajar baca tulis Al-Qur'an
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bidang agama untuk meningkatkan kualitas warga sekolah dalam kehidupan beragama

MISI CERDAS :

1. Melaksanakan pembinaan secara intensif dan terpadu dalam bidang akademik maupun non akademik untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa
2. Melengkapi fasilitas pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belajar siswa
3. Melaksanakan dan mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan yang dapat membangun jiwa kompetitif

MISI BERKARAKTER

1. Menyediakan regulasi yang bersifat demokratis, aspiratif, dan komprehensif yang berlaku bagi seluruh warga sekolah
2. Melaksanakan regulasi (aturan) secara konsekuen dan tanggung jawab
3. Menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sederhana) di lingkungan sekolah
4. Memberikan penghargaan dan sanksi bagi seluruh warga sekolah secara tegas
5. Melaksanakan pembinaan dan pembiasaan budaya bersih, rapi dan indah

B. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel 4.4. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMPN 21 Bandar Lampung

PENDIDIKAN	GURU	GURU TIDAK TETAP	TU. TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
S2	4			
S1	38	5		1
D3	4			2
D2	3			
D1		1		
SLTA			3	2
SLTP				2
JUMLAH	49	6	3	7

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

C. Data Siswa

Tabel 4.5. Data jumlah siswa 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Ajaran	Jml Calon Siswa	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jml Kls. I+II+III	
		Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl
2015/2016	325	377	11	312	10	304	9	993	30
2016/2017	345	386	12	365	11	292	10	1043	33
2017/2018	334	278	9	368	9	341	9	992	27
2018/2019	297	265	9	269	9	360	9	894	27
2019/2020	345	264	9	262	9	268	9	794	27

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

7.3. Profil SMP Negeri 22 Bandar Lampung

A. Visi dan Misi Sekolah

1. Visi

“Mewujudkan sekolah yang berprestasi, berketerampilan, berkualitas, berlandaskan iman dan takwa”.

2. MISI

1. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif
2. Melaksanakan KTSP dengan efektif dan efisien
3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien
4. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan keterampilan dan kesehatan
5. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan pengajaran
6. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan dan kebudayaan
7. Membentuk team work sekolah yang berkualitas
8. Mengikuti berbagai perlombaan dalam segala jenjang (tingkatan)
9. Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah
10. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler

B. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- 1) Jumlah Tenaga Pendidik /Guru : 56 orang
- 2) Jumlah Tenaga Administrasi/Staf TU: 5 orang

C. Data Siswa

Jumlah siswa ada sebanyak 965 orang dari 32 kelas, atau secara rata-rata ada sebanyak 30 atau 31 orang per kelas.

7.4. Profil SMP Negeri 23 Bandar Lampung

A. Visi dan Misi Sekolah

1. Visi Sekolah

“Berprestasi, terampil, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan taqwa.”

2. Misi Sekolah

- 1) Melaksanakan proses mengajar secara optimal
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana siswa agar dapat belajar dengan nyaman
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana Guru, TU agar dapat bekerja secara optimal
- 4) Memberikan bekal kemampuan dasar (Pengetahuan dan Keterampilan) bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan menengah atau untuk kehidupan sehari-hari.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui kegiatan yang bernuansakan IMTAQ bagi warga sekolah,
- 6) Menumbuhkan kesadaran pada semua warga sekolah untuk mengetahui tugas dan kewajibannya.
- 7) Melaksanakan pembinaan secara invensif terhadap kegiatan ekstrakurikuler agar bakat potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal.
- 8) Menanamkan perilaku akhlak mulia melalui pembiasaan yang rutin pada kegiatan belajar mengajar dikelas.

B. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel 4.6. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

PENDIDIKAN	GURU	GURU TIDAK TETAP	TU. TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP
S2	5	-	-	-
S1	44	9	2	4
D3	1	-	-	1
D2	-	-	-	-
D1	2	1	-	-
SLTA	-	-	-	2
SLTP	-	-	-	-
JUMLAH	51	10	2	7

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

C. Data Siswa

Tabel 4.7. Data Jumlah Siswa Lima Tahun Terakhir

Tahun Ajaran	Jumlah Calon Siswa	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jml Kls. I+II+III	
		Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl	Jml Siswa	Jml Rmbl
2015/2016		285	12	283	9	285	7	880	28
2016/2017		292	10	303	10	280	9	875	29
2017/2018		255	8	288	9	301	10	844	27
2018/2019		257	8	250	8	284	9	791	25
2019/2020		245	8	243	8	250	8	738	24

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

Profil SMP Negeri 28 Bandar Lampung

Visi dan Misi Sekolah

Visi Sekolah

"Terwujudnya sekolah bermutu yang berwawasan lingkungan sehingga menghasilkan peserta didik berprestasi berdasarkan IMTAQ dan IPTEK."

1. Misi Sekolah

- 1) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Menciptakan siswa berprestasi yang berkarakter.
- 3) Menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman berdasarkan IMTAQ dan IPTEK.
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang sekolah berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan pelayanan pembelajaran baik intra kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler menuju standar nasional pendidikan.
- 6) Menjalinkan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dengan pemerintah, komite sekolah, masyarakat serta dunia usaha / kewirausahaan.

A. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1) Tabel 4.8. Data Tenaga Pendidik

Tingkat Pendidikan	Status Guru		Jenis Kelamin		Jumlah
	GT	GTT	Laki	Peremp	
S2	3	-	1	3	4
S1	29	8	9	28	37
D3/Sarmud	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-
D1 /PGSLTP	1	-	1	-	1
SLTA	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
Jumlah	34	8	11	31	42

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

2) Tabel 4.9. Data Tenaga Kependidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Status Kepegawaian		Ket
			PNS	Honor	
1	S1	3	1	2	TU
2	D3/Sarmud	1	-	1	TU
3	D2	-	-	-	-
4	D1	-	-	-	-
5	SLTA	2	2	-	TU
	SMK	1	-	1	Kebersihan
6	SMP	3	-	3	Penjaga Sekolah
7	SD	1	-	1	Satpam
Jumlah		10	3	8	

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

C. Data Siswa

Tabel 4.10. Data siswa Tahun Pelajaran 2005/2006 s.d 2019/2020

Tahun Ajaran	Jml Pendaftar (siswa baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII, VIII, IX)	
		Jml siswa	Jml Rombel	Jml siswa	Jml Rombel	Jml siswa	Jml Rombel	Jml siswa	Jml Rombel
2005/2006	144	160	4	158	4	97	4	414	12
2006/2007	139	160	4	154	4	150	4	456	12
2007/2008	153	160	4	141	4	138	4	430	12
2008/2009	153	160	4	159	4	139	4	455	12
2009/2010	143	158	4	156	4	145	4	459	12
2010/2011	131	185	6	170	6	143	5	498	17
2011/2012	175	262	7	180	5	168	5	610	17
2012/2013	246	195	5	256	7	176	5	627	17
2013/2014	319	289	10	191	8	238	9	703	27
2014/2015	267	267	8	269	7	189	6	725	21
2015/2016	550	238	7	261	7	261	7	760	21
2016/2017	288		8		8		7		23
2017/2018		216	8		7		7		23
2018/2019	226	224	7	237	8	249	8	710	23
2019/2020	225	202	7	224	7	235	8	661	22
2020/2021	205	181	6	202	7	213	7	596	20

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

B. Paparan Data dan Temuan Hasil Kajian

1. Paparan Data

Dalam memaparkan data mengenai pelaksanaan program bina lingkungan pada SMP Negeri seKota Bandar Lampung, peneliti menanyakan kepada para informan selaku sumber data. Untuk memaparkan data secara lebih terperinci, maka langkah pertama yang peneliti lakukan adalah membuat coding sebagai berikut:

Tabel 4.11. Coding informan

No	Coding	Status
1	W.01/01/SC/F.1.1/2020	Kepala Sekolah SMPN 19
2	W.02/02/YU/F.1.1/2020	Kepala Sekolah SMPN 21
3	W.03/03/RN/F.1.1/2020	Kepala Sekolah SMPN 22
4	W.04/04/IQ/F.1.1/2020	Kepala Sekolah SMPN 23
5	Wk.01/05/YM/F.1.1/2020	Waka Kesiswaan SMPN 28

Keterangan:

01 = Kode sekolah

01 = Kode informan

SC = Singkatan Nama Informan

F.1.1 = Kode focus dan sub focus yang ditanyakan

2020 = Tahun penelitian

1.1. Perencanaan Program Bina Lingkungan

Untuk mengungkap data mengenai perencanaan program bina lingkungan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan aktivitas perencanaan program bina lingkungan, yaitu bagaimana merumuskan perencanaan, bagaimana memenuhi kebutuhan sumber daya, bagaimana melaksanakan rencana, dan bagaimana mengatasi masalah kesulitan pelaksanaan program bina lingkungan.

Setelah peneliti mengajukan pertanyaan terhadap informan, ingin mengungkap keterangan tentang perencanaan, melalui pertanyaan “bagaimana saudara merumuskan tujuan

perencanaan program bina lingkungan?” maka informan berinisial: 01/01/SC/F.1.1/2020 memberikan penjelasan bahwa: “Dalam hal merumuskan tujuan program bina lingkungan, kami melakukan rapat persiapan pembentukan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)”.

Isi pertanyaan yang serupa juga ditanyakan kepada informan kedua yang berisial: 02/02/YU/F.1.1/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Untuk merumuskan tujuan program bina lingkungan, sekolah membentuk tim untuk sosialisasi dengan orang tua terkait program bina lingkungan”.

Selanjutnya peneliti mengajukan juga pertanyaan yang serupa kepada informan ketiga yang berisial: 03/03/RN/F.1.1/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa: “Dalam merumuskan tujuan program bina lingkungan, kami menyesuaikan antara kuota rombongan belajar yang ada dengan sarana dan prasarana yang tersedia.”

Isi pertanyaan yang serupa juga peneliti ajukan kepada informan keempat yang berinisial: 04/04/IQ/F.1.1/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Kami merumuskan tujuan program bina lingkungan menyesuaikan antara kebutuhan dengan rombongan belajar yang ada.”

Berikutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang serupa kepada informan kelima yang berisial: 05/05/YM/F.1.1/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Kami merumuskan tujuan program bina lingkungan berdasarkan SK Dinas masalah jalur Zonasi selanjutnya ditunjuk Panitia Sekolah, dimana: 1) Panitia PPDB dengan ketua panitia Kepala Sekolah; 2) Menyebarkan informasi ke masyarakat melalui benzer dan media sosial; 3) Pengumuman syarat penerimaan peserta didik baru melalui benzer dan sosmed”.

Berdasarkan paparan hasil jawaban dari kelima sumber informan keseluruhannya melakukan rapat pembentukan panitia sekolah untuk persiapan penerimaan peserta didik baru PPDB

yang diketuai oleh Kepala Sekolah, dimana 2 orang dari informan menyebutkan bahwa dalam merumuskan tujuan program bina lingkungan menyesuaikan dengan kuota atau kebutuhan sekolah sedangkan 3 orang informan lainnya tidak menyebutkan adanya penyesuaian dengan kuota, melainkan langsung melakukan rapat untuk sosialisasi ke masyarakat.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terhadap informan, untuk mengungkap keterangan tentang perencanaan, melalui pertanyaan “bagaimana saudara memenuhi kebutuhan sumber daya untuk terlaksananya program bina lingkungan?” maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.1.2/2020 memberikan penjelasan bahwa:

“Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya untuk terlaksananya program bina lingkungan, sekolah menyesuaikan dengan sumber daya dan dana yang tersedia”

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan kedua, yang berinisial: W.02/02/YU/F.1.2/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya agar terlaksananya program bina lingkungan, sekolah kami melaksanakan Workshop, Pelatihan dan Seminar”

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang isinya sama kepada informan ketiga, yang berinisial: W.03/03/RN/F.1.2/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya agar terlaksananya program bina lingkungan, saya membagi tugas dengan guru-guru yang ada”.

Kemudian isi pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan keempat, yang berinisial: W.04/04/IQ/F.1.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, yaitu dengan cara kami memberdayakan sumber daya/guru yang ada”.

Berikutnya penulis juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial:

Wk.01/05/YM/F.1.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, maka kami membentuk panitia PPDB sekolah”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan program bina lingkungan pada umumnya melibatkan sebagian besar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program bina lingkungan dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai petunjuk teknis yang ada, dan ada 1 (satu) orang informan dalam memenuhi kebutuhan sumber dayanya mengadakan workshop, pelatihan dan seminar.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan terhadap informan, untuk mengungkap keterangan tentang perencanaan, melalui pertanyaan “bagaimana saudara melaksanakan rencana program bina lingkungan?” maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.1.3/2020 memberikan penjelasan bahwa:

“Dalam melaksanakan rencana program bina lingkungan, kami menyesuaikan dengan rencana dan jadwal yang telah disusun”.

Isi pertanyaan serupa juga diajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.1.3/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Kami melaksanakan rencana program bina lingkungan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah dibuat”.

Selanjutnya isi pertanyaan yang sama juga diajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.1.3/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Untuk melaksanakan rencana program bina lingkungan, kami membagi tugas dalam 4 bidang/loket : 1) Bagian penerimaan pendaftaran; 2) Operator pengentri data; 3) Tim survey lapangan; 4) Tim yang menentukan siswa yang diterima”.

Pertanyaan yang sama juga selanjutnya diajukan kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.1.3/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Dalam melaksanakan rencana program bina lingkungan, sekolah membuat kriteria sesuai dengan yang dituangkan dalam juknis”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM /F.1.3/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Rencana program bina lingkungan dilaksanakan sesuai petunjuk Dinas dengan persyaratan yang sudah ada”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam melaksanakan rencana program bina lingkungan secara keseluruhan melaksanakan rencana program bina lingkungan sesuai dengan rencana dan juknis yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang perencanaan bina lingkungan, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana saudara mengatasi masalah kesulitan dalam pelaksanaan program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.1.4/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Jika terjadi masalah/kesulitan dalam pelaksanaan program bina lingkungan, maka Wali kelas dan guru BK melakukan konsultasi dengan orang tua/wali siswa”.

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU /F.1.4/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Jika terjadi masalah/kesulitan dalam pelaksanaan program bina lingkungan, maka sekolah melakukan home visit yang dilakukan oleh wali kelas dan guru BK”.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.1.4/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Masalah/kesulitan yang terjadi pelaksanaan program bina lingkungan seperti calon siswa yang tidak dapat diterima melalui jalur bina lingkungan, maka tim survey menemui kembali calon siswa tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan

tidak dapat diterima melalui jalur biling tetapi masih diberi kesempatan untuk mendaftar melalui jalur regular”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.1.4/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Untuk mengatasi masalah/kesulitan dalam pelaksanaan program bina lingkungan, kami selalu berkonsultasi dengan orang tua siswa”.

Berikutnya pertanyaan yang sama juga diajukan kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.1.4/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Jika ada permasalahan atau kesulitan dalam pelaksanaan bina lingkungan, maka akan dicatat dan dikonsultasikan dengan dinas”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam pelaksanaan rencana bina lingkungan hampir tidak menemui permasalahan yang berarti, kalau pun ada permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dengan berkonsultasi kepada orang tua/wali murid serta ada 1 (satu) informan yang menyebutkan jika menemui masalah/kesulitan akan berkonsultasi dengan dinas pendidikan Kota Bandar Lampung.

1.2. Masukan Program Bina Lingkungan

Untuk mengungkap keterangan tentang masukan program bina lingkungan, maka penulis mengajukan pertanyaan: “Bagaimanakah kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.2.1/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan adalah anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi”.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.2.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan adalah yang memenuhi persyaratan yang dimiliki pendaftar dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan”.

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.2.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan adalah siswa dari keluarga tidak mampu; tinggal di rumah sederhana; serta dengan melihat KK dan KTP orang tua”.

Selanjutnya juga peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.2.1/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan adalah seperti yang dituangkan dalam syarat-syarat program bina lingkungan”.

Berikutnya juga peneliti ajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.2.1/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kriteria siswa yang masuk dalam program bina lingkungan adalah: 1) Bagi siswa yang tidak/kurang mampu melalui: a)SKTM yang dikeluarkan oleh Lurah; b) Photo rumah; c) KK + KTP harus Bandar Lampung; 2) Setelah hasil survey jika ada kejanggalan panitia berkoordinasi dengan dinas.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan telah menetapkan kriteria calon siswa bina lingkungan adalah dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang

dikeluarkan oleh Lurah, indicator ini lebih bersifat administrative sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk dimanipulasi.

Untuk mengungkap keterangan tentang masukan program bina lingkungan, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana melibatkan peran serta para guru dalam pelaksanaan program bina lingkungan?” maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.2.2/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program bina lingkungan, kami melibatkan guru-guru dalam proses penerimaan siswa biling”.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan pada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.2.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program bina lingkungan para guru berperan aktif. Tetapi dalam memberikan pelajaran, guru tidak membedakan antara siswa regular dan siswa bina lingkungan”.

Berikutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama pada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.2.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Pada pelaksanaan program bina lingkungan, guru dalam memberikan pelajaran tidak membedakan antara siswa bina lingkungan dan regular”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.2.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program bina lingkungan, guru memberikan pelajaran tidak membedakan antara siswa bina lingkungan dan regular, dan di dalam kelas semua siswa memiliki hak yang sama”.

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.2.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Sekolah melibatkan peran serta para guru dalam pelaksanaan program bina lingkungan dengan membentuk panitia yang terdiri atas: guru, TU dan operator sekolah”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam pelaksanaan bina lingkungan telah melibatkan peranan guru, bahkan tata usaha dan operator sekolah dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah.

1.3. Proses Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

Untuk mengungkap keterangan tentang masukan program bina lingkungan berikutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara menyediakan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.2.3/2020 memberikan keterangan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan program bina lingkungan, dana disediakan dari Pemda Kota Bandar Lampung”.

Isi pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.2.3/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Pelaksanaan program bina lingkungan mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bandar Lampung”.

Berikutnya pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.2.3/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan berasal dari Pemda Kota Bandar Lampung”.

Selanjutnya juga peneliti ajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.2.3/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kegiatan pelaksanaan program bina lingkungan mendapat bantuan dana dari Pemda Kota Bandar Lampung”.

Selanjutnya peneliti mengajukan juga pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial:

Wk.01/05/YM/F.2.3/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan, selain dari Pemda Kota Bandar Lampung juga menggunakan dana dari BOS dan Komite”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu bersumber dari APBD kota Bandar Lampung, dan ada 1 (satu) orang informan yang menyatakan selain dana dari Pemda Kota Bandar Lampung juga bersumber dari BOS dan komite”.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang masukan program bina lingkungan, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana saudara mengelola sumber biaya dalam pelaksanaan program bina lingkungan?”, maka informan berinisial : W.01/01/SC/F.2.4/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Dalam mengelola sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan adalah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang ada”.

Isi pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.2.4/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Pengelolaan sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan, menyesuaikan dengan RKAS yang telah dianggarkan”.

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.2.4/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kami mengelola sumber pembiayaan pelaksanaan program bina lingkungan adalah berdasarkan RKAS yang telah disusun”.

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ /F.2.4/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Sekolah mengelola sumber pembiayaan pelaksanaan program bina lingkungan adalah berdasarkan RKAS yang telah disusun”.

Begitu juga kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.2.4 peneliti mengajukan pertanyaan yang sama, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan dikelola oleh panitia sesuai dengan petunjuk teknis dinas”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam mengelola sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang masukan program bina lingkungan, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.2.5/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Dalam mengkondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan, sekolah tidak membedakan antara siswa bina lingkungan dan regular, atau memiliki hak dan kewajiban yang sama”.

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.2.5/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kami memfasilitasi sarana parasarana sekolah dengan tidak membedakan antara siswa regular dan siswa bina lingkungan”.

Begitu juga kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.2.5/2020 penulis mengajukan pertanyaan yang sama, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Di dalam kelas, siswa bina lingkungan dan regular mendapatkan hak dan kewajiban yang sama”.

Berikutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial:

W.04/04/IQ/F.2.5/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Di dalam kelas, siswa bina lingkungan dan regular tidak dibedakan atau terkotak-kotak”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.2.5/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Dalam hal mengkondisikan lingkungan belajar, siswa program bina lingkungan disamakan dengan siswa regular”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam mengkondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan, tidak membedakan perlakuan antara siswa bina lingkungan dengan siswa regular, semua mendapatkan hak yang sama”.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang proses pelaksanaan program bina lingkungan, penulis mengajukan pertanyaan: “Bagaimana mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan?, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.3.1/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan sesuai juknis PPDB”.

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.3.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan, melalui proses sosialisasi waktu dan syarat pendaftaran dengan menggunakan benner yang dipasang disekolah; Masyarakat yang memenuhi syarat dan ketentuan mendaftar sebagai siswa bina lingkungan; Panitia menyeleksi berkas dan dilaksanakan survey”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.3.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan mengikuti juknis yang berlaku”.

Pertanyaan yang sama selanjutnya penulis ajukan juga kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ /F.3.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan di sekolah kami berdasarkan juknis yang berlaku”.

Selanjutnya, penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05 /YM/F.3.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan sesuai petunjuk Dinas dengan persyaratan yang sudah ada”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam hal mekanismen dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan, sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung.

Untuk mengungkap keterangan tentang proses pelaksanaan bina lingkungan, penulis juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana penyelenggaraan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.3.2/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Penyelenggaraan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan dilakukan dengan memverifikasi data dan survey ke rumah pendaftar”.

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.3.2/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kami menyelenggarakan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan dengan memverifikasi data survey ke tempat tinggal pendaftar”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.3.2/2020, maka yang bersangkutan menerangkan bahwa: “Penyelenggaraan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan mengikuti juknis yang berlaku”.

Isi pertanyaan yang sama juga selanjutnya penulis ajukan kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.3.2/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Sekolah menyelenggarakan seleksi siswa baru dari jalur program bina lingkungan berdasarkan juknis yang berlaku”.

Selanjutnya isi pertanyaan yang sama penulis sampaikan juga kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.3.2/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Seleksi terhadap siswa baru dari jalur program bina lingkungan diselenggarakan sesuai petunjuk Dinas dengan persyaratan yang sudah ada”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam pelaksanaan program bina lingkungan, seluruh sekolah menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa baru mengikuti petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung.

Untuk mengungkap keterangan mengenai proses pelaksanaan program bina lingkungan, peneliti juga mengajukan pertanyaan: “Bagaimana pelaksanaan pembelajaran terhadap siswa dari jalur program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.3.3/2020 memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa regular dan bina lingkungan memiliki hak dan kewajiban yang sama”.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.3.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Pelaksanaan pembelajaran semua siswa, baik siswa bina lingkungan maupun reguler memiliki hak dan kewajiban yang sama”.

Selanjutnya pertanyaan yang sama peneliti sampaikan juga kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.3.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Pelaksanaan pembelajaran terhadap semua siswa, baik siswa bina lingkungan maupun reguler memiliki hak dan kewajiban yang sama”.

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.3.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembelajaran semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama”.

Peneliti selanjutnya juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisiatif: Wk.01/05/YM/F.3.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Antara siswa bina lingkungan dengan siswa reguler tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pembelajarannya”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam pelaksanaan pembelajaran baik reguler maupun siswa bina lingkungan memiliki hak yang sama atau tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan.

1.4. Luaran Program Bina Lingkungan

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang luaran program bina lingkungan, maka penulis mengajukan pertanyaan: “Bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas dari jalur program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.4.1/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengikuti tata-tertib secara disiplin”.

Isi pertanyaan yang sama penulis ajukan juga kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.4.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan melaksanakan pembelajaran tambahan melalui LES dan try out, simulasi UNBK, Latihan Ujian Nasional”.

Selanjutnya pertanyaan yang sama penulis sampaikan juga kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.4.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dari program bina lingkungan, kami berproses sesuai dengan tata tertib yang ada”.

Berikutnya, penulis mengajukan pertanyaan yang isinya sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.4.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sekolah kami berproses sesuai dengan tata tertib yang ada”.

Berikutnya lagi, penulis mengajukan juga pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.4.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, antara siswa program bina lingkungan dengan regular tidak ada perbedaan pelajaran dan mendapat fasilitas yang sama”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, keseluruhan informan memberikan jawaban bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan mengikuti tata-tertib dan disiplin yang ada, dan 1 (satu) orang informan memberikan jawaban, selain mengikuti tata tertib, juga memberikan pelajaran

tambahan melalui les, kursus dan latihan berbagai macam ujian serta latihan ujian nasional.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang luaran program bina lingkungan, maka penulis mengajukan juga pertanyaan: “Bagaimana strategi peningkatan mutu lulusan dari jalur program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.4.2/2020, memberikan keterangan bahwa: “Strategi yang dilakukan dalam peningkatan mutu lulusan yaitu dengan tidak membeda-bedakan siswa reguler dan biling, sehingga mutu lulusan sama”.

Isi pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.4.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Untuk meningkatkan mutu lulusan, strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan LES, try out, simulasi UNBK dan Latihan Ujian Nasional”.

Selanjutnya penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.4.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan mutu lulusan adalah selalu melakukan pembinaan dan pengawasan”.

Berikutnya, penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.4.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Untuk meningkatkan mutu lulusan, strategi yang kami lakukan adalah selalu melakukan pembinaan dan pengawasan”.

Selanjutnya, penulis juga mengajukan pertanyaan yang isinya sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.4.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa: “Strategi yang kami lakukan dalam meningkatkan mutu lulusan adalah dengan memberikan pelajaran dan fasilitas yang sama kepada siswa bina lingkungan dengan siswa reguler”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan pada umumnya strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu lulusan adalah dengan memberikan kursus atau les pelajaran tambahan, tanpa membedakan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang luaran program bina lingkungan, maka peneliti mengajukan juga pertanyaan: “Bagaimana saudara melakukan pembinaan non akademik bagi siswa dari jalur program bina lingkungan?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.4.3/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Kami melakukan pembinaan non akademik sesuai dengan minat dan bakat siswa”.

Selanjutnya, isi pertanyaan yang sama peneliti sampaikan juga kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.4.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Sekolah melakukan pembinaan non akademik, dengan memfasilitasi siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat yang dimiliki siswa”.

Selanjutnya, penulis juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.4.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kami selalu melakukan pembinaan dan pengawasan bidang non akademik sesuai minat dan bakat siswa”.

Berikutnya, penulis juga mengajukan pertanyaan yang isinya sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.4.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Sekolah kami selalu melakukan pembinaan dan pengawasan bidang non akademik”.

Selanjutnya, pertanyaan yang sama juga penulis ajukan kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/

F.4.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Dalam rangka melakukan pembinaan non akademik, sekolah tidak membeda-bedakan pelajaran dan seluruh siswa mendapat fasilitas yang sama”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam memberikan pembinaan non akademik, sekolah tidak membeda-bedakan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama.

1.5. *Outcome* Program Bina Lingkungan

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang *outcome* program bina lingkungan, maka penulis mengajukan juga pertanyaan: “Bagaimana saudara mengetahui keberlanjutan lulusan hasil program bina lingkungan yang dapat mengikuti studi lanjut dalam dan luar negeri?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.5.1/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Untuk mengetahui keberlanjutan lulusan hasil program bina lingkungan yang dapat mengikuti studi lanjut, kami menjalin komunikasi secara langsung dengan para lulusan”.

Isi pertanyaan yang sama penulis juga ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.5.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Keberlanjutan lulusan hasil program bina lingkungan yang mengikuti studi lanjut, kami ketahui dengan cara pihak sekolah mencatat siswa melalui buku lacak alumni”.

Selanjutnya, isi pertanyaan yang sama penulis juga ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.5.1/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Kami dapat mengetahui apakah lulusan hasil program bina lingkungan melanjutkan studinya atau tidak dengan cara bagi yang lulus, mereka membuat laporan ke sekolah/lisan”.

Selanjutnya, penulis juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial:

W.04/04/IQ/F.5.1/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk mengetahui apakah lulusan hasil program bina lingkungan melanjutkan studinya atau tidak yaitu dengan cara: bagi yang lulus, mereka membuat laporan ke sekolah/lisan”.

Berikutnya, penulis juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.5.1/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Setiap kelulusan mencatat seluruh siswa yang lulus, diterima di sekolah negeri dan swasta di Bandar Lampung”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni, dari kelima informan tersebut, 3 (tiga) orang informan menyatakan tetap berkomunikasi langsung dengan para alumni, bahkan 2 (dua) orang informan menyatakan mencatat secara langsung para alumni tersebut dalam buku lacak alumni.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang outcome program bina lingkungan, maka penulis mengajukan juga pertanyaan: “Bagaimana aktivitas lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan, jika tidak melanjutkan studinya?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.5.2/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Bagi para lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan yang tidak melanjutkan studinya, mereka melakukan kegiatan yang positif di tengah-tengah masyarakat”.

Isi pertanyaan yang sama penulis juga ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.5.2/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Aktivitas lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan yang tidak melanjutkan studinya adalah melakukan kegiatan positif seperti membantu orang tua”.

Selanjutnya, isi pertanyaan yang sama peneliti juga ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.5.2/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa: “Para lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan yang tidak melanjutkan studi berupa beragam aktifitas yang dilakukan di masyarakat yang bersifat (positif)”.

Selanjutnya, peneliti juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.5.2/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Lulusan siswa dari jalur program bina lingkungan yang tidak melanjutkan studi adalah beragam aktifitas yang dilakukan di masyarakat yang bersifat (positif)”.

Berikutnya, peneliti juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.5.2/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Menurut laporan yang kami ketahui bahwa para lulusan dari jalur program bina lingkungan adalah seratus persen melanjutkan study”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan pada umumnya para alumni melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau yang sederajat, kalau pun karena terpaksa belum melanjutkan study mereka melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua.

Selanjutnya untuk mengungkap keterangan tentang *outcome* program bina lingkungan, maka peneliti mengajukan juga pertanyaan: “Bagaimana saudara mengetahui aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industri masing-masing?”, maka informan berinisial: W.01/01/SC/F.5.3/2020, memberikan keterangan bahwa:

“Untuk mengetahui apakah aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industry adalah dari laporan secara lisan dari siswa/alumni”.

Isi pertanyaan yang sama penulis juga ajukan kepada informan kedua yang berinisial: W.02/02/YU/F.5.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Kami dapat mengetahui apakah aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industry adalah dari buku lacak alumni”.

Selanjutnya, isi pertanyaan yang sama peneliti juga ajukan kepada informan ketiga yang berinisial: W.03/03/RN/F.5.3/2020, yang bersangkutan menerangkan bahwa:

“Kegiatan/aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industry dapat kami ketahui dimana sebagian besar mereka membuat laporan secara lisan”.

Selanjutnya, peneliti juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan keempat yang berinisial: W.04/04/IQ/F.5.3/2020, yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industry dengan cara sebagian besar mereka membuat laporan secara lisan”.

Berikutnya, penulis juga mengajukan isi pertanyaan yang sama kepada informan kelima yang berinisial: Wk.01/05/YM/F.5.3/2020, maka yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa:

“Aktivitas siswa dalam pengembangan dunia usaha/industry dimulai sejak di sekolah yaitu melalui ekstrakurikuler seperti olah raga dan pengembangan diri melalui les matematika dan IPA”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan bahwa aktivitas para alumni dalam mengembangkan usaha atau kewirausahaannya dapat diketahui sebagian besar dari laporan lisan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kursus-kursus keterampilan.

2. Temuan Hasil Penelitian

2.1. Perencanaan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil jawaban dari kelima sumber informan keseluruhannya melakukan rapat pembentukan panitia sekolah untuk persiapan penerimaan peserta didik baru PPDB yang diketuai oleh Kepala Sekolah, dimana 2 orang dari informan menyebutkan bahwa dalam merumuskan tujuan program bina lingkungan menyesuaikan dengan kuota atau kebutuhan sekolah sedangkan 3 orang informan lainnya tidak menyebutkan adanya penyesuaian dengan kuota, melainkan langsung melakukan rapat untuk sosialisasi ke masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan program bina lingkungan pada umumnya melibatkan sebagian besar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program bina lingkungan dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai petunjuk teknis yang ada, dan ada 1 (satu) orang informan dalam memenuhi kebutuhan sumber dayanya mengadakan workshop, pelatihan dan seminar.

Untuk melaksanakan rencana program bina lingkungan secara keseluruhan melaksanakan rencana program bina lingkungan sesuai dengan rencana dan juknis yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan rencana bina lingkungan hampir tidak menemui permasalahan yang berarti, kalau pun ada permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dengan berkonsultasi kepada orang tua/wali murid serta ada 1 (satu) informan yang menyebutkan jika menemui masalah/kesulitan akan berkonsultasi dengan dinas pendidikan Kota Bandar Lampung.

2.2 Masukan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan telah menetapkan kriteria calon siswa bina lingkungan adalah dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah, indikator ini lebih bersifat administrative

sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk dimanipulasi. Dalam pelaksanaan bina lingkungan telah melibatkan peranan guru, bahkan tata usaha dan operator sekolah dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah. Adapun proses pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Sedangkan pada pelaksanaan program bina lingkungan sudah menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa mengikuti petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Pada pelaksanaan pembelajaran baik regular maupun siswa bina lingkungan memiliki hak yang sama atau tidak ada perbedaan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan.

1.3. Proses Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu bersumber dari APBD kota Bandar Lampung, dan ada 1 (satu) orang informan yang menyatakan selain dana dari Pemda Kota Bandar Lampung juga bersumber dari BOS dan komite". Adapun dalam mengelola sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan.

Pada keseluruhan SMP Negeri se kota Bandar Lampung sudah mengondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan, tidak membedakan perlakuan antara siswa bina lingkungan dengan siswa regular, semua mendapatkan hak yang sama. Sedangkan mekanisme dan prosedur penerimaan siswa baru dari jalur program bina lingkungan, sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Adapun pelaksanaan program bina lingkungan, seluruh sekolah menyelenggarakan seleksi

penerimaan siswa baru mengikuti petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran baik regular maupun siswa bina lingkungan memiliki hak yang sama atau tidak ada perbedaan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan. Alumni dari siswa bina lingkungan pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni dimana, para lulusan tersebut memberikan laporan ke sekolahnya baik secara lisan atau pun tulisan di buku alumni. Pada umumnya para alumni melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau yang sederajat, kalau pun karena terpaksa belum melanjutkan study mereka melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua. Para alumni dalam mengembangkan usaha atau kewirausahaannya melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kursus-kursus keterampilan.

1.4. Luaran Program Bina Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, keseluruhan informan memberikan jawaban bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan mengikuti tata-tertib dan disiplin yang ada, dan 1 (satu) orang informan memberikan jawaban, selain mengikuti tata tertib, juga memberikan pelajaran tambahan melalui les, kursus dan latihan berbagai macam ujian serta latihan ujian nasional. Pada umumnya strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu lulusan adalah dengan memberikan kursus atau les pelajaran tambahan, tanpa membedakan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan. Seluruh SMP Negeri se kota Bandar Lampung dalam memberikan pembinaan non akademik, sekolah tidak membedakan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama.

1.5. Outcome Program Bina Lingkungan

Berdasarkan paparan hasil wawancara dari kelima informan pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni, dari kelima informan tersebut, 3 (tiga) orang informan menyatakan tetap berkomunikasi langsung dengan para alumni, bahkan 2 (dua) orang informan menyatakan mencatat secara langsung para alumni tersebut dalam buku lacak alumni. Pada umumnya para alumni melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau yang sederajat, kalau pun karena terpaksa belum melanjutkan study mereka melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua. Adapun aktivitas para alumni dalam mengembangkan usaha atau kewirausahaannya dapat diketahui sebagian besar dari laporan lisan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kursus-kursus keterampilan.

C. PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

Berdasarkan paparan data dan analisis deskriptif sebagaimana diungkapkan pada sub paparan data, penjelasan tentang simpulan analisis deskriptif serta temuan hasil analisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan yang dalam hal pembahasan ini dibahas dengan teori, atau perundang-undangan dan temuan hasil penelitian terdahulu yang dibahas sebagai berikut:

- 1) Pada perencanaan program bina lingkungan diperoleh temuan: Setelah peneliti melakukan penelusuran dari berbagai sumber bahwa temuan di atas sejalan dengan pendapat Tayibnapi yang menyatakan perencanaan yang efektif mana kala perencanaan tersebut dapat membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Sesuai pula dengan qur'an surat Al-anfal; ayat 60 yang artinya: "dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda

yang ditambah untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” Ayat ini jelas memerintahkan kita untuk melakukan suatu perencanaan. Meski ayat tersebut secara khusus membicarakan tentang perencanaan militer, namun perintah tersebut juga mencakup berbagai perencanaan dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan penetapan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam merumuskan perencanaan sudah mengacu kepada petunjuk teknis yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Nomor: 421/IV.21/2020, tentang Juknis Penyelenggaraan PPDB Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2020/2021. Untuk memenuhi kebutuhan rencana sumber daya dalam melaksanakan program bina lingkungan sudah efektif, karena sudah melibatkan sebagian besar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program bina lingkungan sesuai petunjuk teknis yang ada. Dalam melaksanakan rencana program bina lingkungan sudah efektif, artinya sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana bina lingkungan hampir tidak menemui permasalahan yang berarti, kalau pun ada permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dengan berkonsultasi kepada orang tua/wali murid serta dinas pendidikan Kota Bandar Lampung.

- 2) Penetapan kriteria calon siswa bina lingkungan adalah dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, berarti telah

sesuai dengan ketentuan juknis yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan bina lingkungan telah melibatkan peranan guru, bahkan tata usaha dan operator sekolah. Dalam penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu bersumber dari APBD kota Bandar Lampung serta dana BOS dan komite. Dalam mengelola sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan RKAS yang telah ditetapkan.

Seluruh SMP Negeri se kota Bandar Lampung telah mengondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan, tidak membedakan perlakuan antara siswa bina lingkungan dengan siswa reguler, semua mendapatkan hak yang sama. Sesuai pendapat Tayibnapis, dikatakan efektif manakala input program biling menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

- 3) Proses pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Sesuai pendapat Tayibnapis, proses biling dikatakan efektif manakala proses biling tersebut membantu mengimplementasikan keputusan. Dalam pelaksanaan program bina lingkungan sudah menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa mengikuti petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Adapun pelaksanaan pembelajaran baik reguler maupun siswa bina lingkungan memiliki hak yang sama atau tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan, hal ini sesuai hasil penelitian Terry Irenewaty dan Aman bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tergantung kepada kesediaan sekolah itu sendiri.

- 4) Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas selain melaksanakan proses pembelajaran dengan mengikuti tata-tertib dan disiplin yang ada, juga memberikan pelajaran tambahan melalui les, kursus dan latihan berbagai macam ujian serta latihan ujian nasional. Pada umumnya strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu lulusan adalah dengan memberikan kursus atau les pelajaran tambahan, tanpa membedakan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan. Dalam memberikan pembinaan non akademik tidak membedakan antara siswa regular dengan siswa bina lingkungan, semua diperlakukan sama. Sesuai pendapat Tayibnapis, produk dikatakan efektif, manakala produk digunakan untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?
- 5) Alumni dari siswa bina lingkungan pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni dimana, para lulusan tersebut memberikan laporan ke sekolahnya baik secara lisan atau pun tulisan di buku alumni. Pada umumnya para alumni melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau yang sederajat, kalau pun karena terpaksa belum melanjutkan study mereka melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua. Para alumni dalam mengembangkan usaha atau kewirausahaannya melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kursus-kursus keterampilan.



KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif sebagaimana diuraikan pada sub paparan data dan temuan hasil penelitian serta simpulan hasil analisis seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan program bina lingkungan di SMP Negeri se kota Bandar Lampung telah dilakukan secara efektif. Simpulan tersebut dibuktikan adanya temuan hasil analisis sebagai berikut:

1. Temuan hasil analisis tentang perencanaan program bina lingkungan

Perencanaan program bina lingkungan sudah dirumuskan secara efektif, karena sudah mengacu kepada petunjuk teknis yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan rencana sumber daya dalam melaksanakan program bina lingkungan sudah efektif, karena sudah melibatkan sebagian besar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program bina lingkungan sesuai petunjuk teknis yang ada. Dalam

melaksanakan rencana program bina lingkungan sudah efektif, artinya sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan rencana bina lingkungan hampir tidak menemui permasalahan yang berarti, kalau pun ada permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dengan berkonsultasi kepada orang tua/wali murid serta dinas pendidikan Kota Bandar Lampung.

2. Temuan hasil analisis tentang masukan program bina lingkungan

Kriteria calon siswa bina lingkungan ditetapkan berdasarkan dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, berarti telah sesuai dengan ketentuan juknis yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan bina lingkungan telah melibatkan peranan guru, bahkan tata usaha dan operator sekolah. Penyediaan dana untuk pelaksanaan program bina lingkungan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu bersumber dari APBD kota Bandar Lampung serta dana BOS dan komite. Dalam mengelola sumber biaya pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan RKAS yang telah ditetapkan. Dalam mengondisikan lingkungan belajar terhadap pelaksanaan program bina lingkungan, tidak membedakan perlakuan antara siswa bina lingkungan dengan siswa reguler, semua mendapatkan hak yang sama.

3. Temuan hasil analisis tentang proses pelaksanaan program bina lingkungan

Proses pelaksanaan program bina lingkungan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan program bina lingkungan sudah menyelenggarakan seleksi penerimaan siswa mengikuti petunjuk teknis dari dinas pendidikan kota Bandar Lampung. Begitu juga dalam pelaksanaan pembelajaran baik reguler maupun siswa bina

lingkungan memiliki hak yang sama atau tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan.

4. Temuan hasil analisis tentang luaran program bina lingkungan

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas selain melaksanakan proses pembelajaran dengan mengikuti tata-tertib dan disiplin yang ada, juga memberikan pelajaran tambahan melalui les, kursus dan latihan berbagai macam ujian serta latihan ujian nasional. Pada umumnya strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu lulusan adalah dengan memberikan kursus atau les pelajaran tambahan, tanpa membeda-bedakan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan. Dalam memberikan pembinaan non akademik tidak membeda-bedakan antara siswa reguler dengan siswa bina lingkungan, semua diperlakukan sama.

5. Temuan hasil analisis tentang outcome program bina lingkungan

Para alumni dari siswa bina lingkungan, pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni dimana, para lulusan tersebut memberikan laporan ke sekolahnya baik secara lisan atau pun tulisan di buku alumni. Pada umumnya para alumni melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA atau yang sederajat, kalau pun karena terpaksa belum melanjutkan study mereka melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua. Para alumni dalam mengembangkan usaha atau kewirausahaannya melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri seperti kursus-kursus keterampilan.

B. IMPLIKASI

Untuk merumuskan implikasi penulis melakukan penelusuran hasil jawaban informan berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Jika ditemukan materi pertanyaan yang jawabannya antara informan yang satu dengan yang lainnya sangat bervariasi maka dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan implikasi yang dipaparkan pada penjelasan berikut ini:

1. Dalam hal perencanaan program bina lingkungan, setelah dilakukan penelusuran didapat jawaban informan dari 5 (lima) sumber informan yang digali umumnya mereka menyatakan yang mana 2 (dua) orang informan menyatakan bahwa dalam perumusan tujuan program bina lingkungan menyesuaikan dengan kuota atau kebutuhan sekolah, sedangkan 3 (tiga) orang informan lainnya tidak menyebutkan adanya penyesuaian dengan kuota atau kebutuhan sekolah melainkan langsung melakukan rapat sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini peneliti mempersepsi bahwa sumber informan belum dapat memaknai redaksi pertanyaan yang diajukan. Jika terjadi hal yang demikian sebaiknya informan sebelum memberikan keterangan memahami secara cermat tentang materi pertanyaan yang diberikan.
2. Dalam hal masuk dalam program bina lingkungan, setelah dilakukan penelusuran didapat jawaban dari 5 (lima) sumber informan yang digali umumnya mereka menyatakan yang mana telah menetapkan kriteria calon siswa bina lingkungan adalah dari keluarga yang tidak berkemampuan secara ekonomi berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah, indicator ini menurut persepsi peneliti lebih bersifat administrative sehingga kemungkinan dapat terjadi manipulasi. Untuk itu perlu ada indicator yang bersifat kuantitatif sehingga dapat lebih terukur, misalnya berdasarkan besarnya gaji atau pendapatan orang tua.

3. Dalam hal proses pelaksanaan bina lingkungan, setelah dilakukan penelusuran terhadap jawaban dari kelima sumber informan pada umumnya mereka memberikan jawaban bahwa 4 (empat) orang informan menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur pelaksanaan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber dana dari pemda, dan 1 (satu) sumber informan menyatakan selain menggunakan sumber dana dari pemda kota Bandar Lampung, juga dapat menggunakan dana BOS dan komite. Dalam hal ini peneliti mempersepsi masih adanya ketidak-samaan persepsi terkait dengan sumber dana yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program bina lingkungan, untuk itu perlu adanya ketentuan yang jelas terkait dengan sumber dana program bina lingkungan.
4. Dalam hal luaran program bina lingkungan, setelah dilakukan penelusuran terhadap jawaban dari kelima sumber informan, 4 (empat) orang sumber informan menyatakan bahwa untuk menghasilkan output atau lulusan yang berkualitas dari jalur program bina lingkungan dalam melaksanakan proses pembelajaran mengikuti tata-tertib dan disiplin yang ada, dan 1 (satu) sumber informan memberikan jawaban, selain mengikuti tata-tertib yang ada juga memberikan pelajaran tambahan melalui les, kursus dan latihan berbagai macam ujian serta latihan ujian nasional. Dalam hal ini peneliti mempersepsi bahwa pada umumnya sumber informan belum memiliki strategi pencapaian target standar kualitas lulusan.
5. Dalam hal *outcome* program bina lingkungan, setelah dilakukan penelusuran terhadap jawaban sumber informan. pada umumnya tetap melakukan komunikasi dengan para alumni, dari kelima informan tersebut, 3 (tiga) orang informan menyatakan tetap berkomunikasi langsung dengan para alumni, bahkan 2 (dua) orang informan menyatakan mencatat secara langsung para alumni tersebut dalam buku

lacak alumni. Dalam hal ini peneliti mempersepsi bahwa sumber informan belum menganggap penting data alumni. Untuk itu sebaiknya sekolah memiliki data tentang keberlanjutan study lulusan hasil program bina lingkungan baik di dalam maupun di luar negeri dengan selalu menjalin komunikasi langsung dengan para lulusan, mencatat laporan baik lisan maupun tulisan dari para alumni serta membuat buku lacak alumni.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan hasil analisis, pembahasan hasil temuan dan rumusan implikasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi :

1. Kepala sekolah sebaiknya ditetapkan berdasarkan kompetensi, karena masih ditemukan ada kepala sekolah yang tidak teliti dalam memberikan keputusan terkait dengan program bina lingkungan, termasuk tidak melakukan *tracer study*/ penelusuran *outcome* yang masih lemah.
2. Sebaiknya kinerja kepala sekolah ditingkatkan supaya lebih optimal lagi dengan cara diberikan upgrading atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang tugasnya selaku kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono, 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Penerbit: PT Rajagrafindo Persada; Jakarta, h. 1.
- Anas Sudijono, 2011. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Penerbit: PT Rajagrafindo: Jakarta, h. 17.
- Anderson, Management Skills, Function and Organizational Performance, (Win.C Brown Pub. 1984), h.295
- Arifin, Zainal, 2010. Makalah: Model-model Evaluasi Program, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI-Bandung.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi Safruddin Abdul. 2010. Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua: Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta.
- Daniel L. Stufflebeam dalam Alkin, Marvin C., 2004. Evaluation Roots, penerbit: Sage Publications: London, h. 247.
- Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 182
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 61
- Dinar Pratama,
<https://dinarpratama.wordpress.com/2010/11/20/model-evaluasi-cipp-context-input-process-product/>

- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Floriberta, 2014. Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya: Penerbit: BooKu: Yogyakarta. Cet. 1.
- Husain Umar, Metode Riset Bisnis. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.56
- Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk & Masa Depan, Penerbit: Bumi Aksara: Jakarta, Ed.1., Cet. 3.
- Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2014, Diterbitkan oleh: BPS Kota Bandar Lampung.
- Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2020.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3
- Lincoln & Guba, Naturalistic Inquiri, h. 39-43 dan Dafid Williams dalam Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, h. 18-20.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (California: Sage Publication Inc, 1994), h.11
- Miles dan Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 11
- Muhaimin, et.al. 2009. Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Kencana.
- Nanang Fattah, 2004. Landasan Manajemen Pendidikan, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya: Bandung, cet. Ke 7.
- Nizarman, 2015. Manajemen Penerimaan Siswa Baru, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.9 No.2 Maret 2015, hal. 224-234, diupload dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/download/1116/925>.
- Radar Lampung, Kamis 15 Oktober 2015, h. 12.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Kualitatif Dasar-dasar Penelitian, Terj. A. Khozin Affandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 30
- S. Nasution, Metode Naturalisme Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), h. 9-12

- S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 27-28
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006), h. 266
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang baik” Bagian Kedua*, Edisi Revisi, Penerbit: Mandar Maju: Bandung.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta, Ed. 2. Cet. 4.
- Suharso dan Retnoningsih, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Penerbit: CV. Widya Karya: Semarang.
- Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.\
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 91
- Tarigan, Antonius yang dikutip dari: https://www.academia.edu/4447903/MENCERMATI_DAMPAK_KEBIJAKAN_PUBLIK_DALAM_PROGRAM_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN.
- Tayibnapi, Farida Yusuf, 2000. *Evaluasi Program*, Penerbit: Rineka Cipta: Jakarta.
- Tribunlampung.co.id. senin, 10 Maret 2014, yang diunduh dari: <http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan-penyebab-40-persen-remaja-di-lampung-tak-bisa-bersekolah?page=3>

- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional, yang diunduh dari: <http://sindiker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. Tentang: Pemerintahan Daerah: yang diunduh dari: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
- Usman, Husaini, 2009. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 3, Jakarta: Bumi Aksara.
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed.2. Penerbit: Gadjah Mada University Press, h.608.
- Wirawan, 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, Penerbit: Rajawali Pers: Jakarta.
- Yesim Ozbarlas, Perspectives an Multicultural Education: Case Studies of A German and An American Female Minority Teacher, dalam Siti Farida, [Digilib.uin-malang.ac.id](http://digilib.uin-malang.ac.id) diakses 20 Mei 2017
- Yusuf, Nanang Qosim, 2011. 21 Days to be Trans human Panduan Menjadi Manusia di atas rata-rata, Penerbit: Zaman; Jakarta.
- <http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-pendidikan-di-indonesia/>
- <http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/download/1373/1178>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>.
- <http://www.koran-jakarta.com/benahi-mutu-pendidikan/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Merdeka_Belajar.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kabupaten_dan_Kota_d_i_Indonesia_menurut_IPM
- <https://radarlampung.co.id/2019/04/09/skema-zonasi-berlaku-ini-daftar-smp-di-kota-sesuai-domisili/>
- <http://lampost.co/berita/ombudsman-bina-lingkungan-langgar-tatanam-hukum>

<http://digilib.unila.ac.id/9156/14/BAB%20I.pdf>

<http://www.harianlampung.com/>

[m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=10648.](http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=10648)

<https://www.lampost.co/berita-wali-murid-minta-ppdb-smp-dievaluasi.html>

[http://www.sinarharapan.co/news/read/150626002/
loloskan-siswa-kaya-program-biling-diprotes.](http://www.sinarharapan.co/news/read/150626002/loloskan-siswa-kaya-program-biling-diprotes)

